



Siti Ammah

**Indegenisasi Pengetahuan
dan Sejarah Perkembangan
Kapitalisme Bus Rapid Transi**

**Indegenisasi Pengetahuan dan Sejarah Perkembangan
Kapitalisme Bus Rapid Transit**
Siti Aminah

Cetakan Pertama: November 2017
Hak Cipta @ Cakra Studi Global Strategis (CSGS)
Desain Sampul & Tata Letak: Widya Septiyaningrum

Diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh
Cakra Studi Global Strategis (CSGS)
Gedung B FISIP Unair
Jl. Dharmawangsa Dalam
Surabaya 60286
Jawa Timur - Indonesia
Telp: (031) 5046453; 61016125; Faks. (031) 5012442
global.strategis@gmail.com
www.csgsunair.org

x + 124 hlm. | 14,8 x 21 cm. | ISBN 978-602-7851-75-7

Dicetak oleh:
PT Revka Petra Media
Jl. Pucang Anom Timur No. 5, Surabaya 60282, Jawa Timur
Telp. (031) 5051711; Faks. (031) 5016848

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Keabsahan dan universalitas teori kapitalisme yang ada di Dunia Ketiga sudah selayaknya dipertanyakan. Tradisi akademis atau keilmuan selama ini di Dunia Ketiga dibangun atas hegemoni keilmuan bukan sebagai proses yang ahistoris, karena itu variabel-variabel historis, dan konteks kekinian yang melekat di Dunia Ketiga juga perlu dipertimbangkan dalam menyusun kerangka pengetahuan yang bersifat membumi.

Semenjak abad ke-20, Ilmu-Ilmu Sosial di Dunia Ketiga dikuasai oleh teori modernisasi yang diklaim bersifat universal. Semenjak itu pula konsentrasi kajian ilmuwan sosial khususnya memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru, teknologi-teknologi baru yang disebarluaskan melalui *teknobook-textbook*, hasil-hasil riset yang diasumsikan bisa membantu membebaskan keterbelakangan sebuah negara yang umumnya berada dibalahan bumi selatan yang dalam diskursus modernisasi dinamakan Dunia Ketiga. Pendekatan yang memadai untuk memahami sejarah ilmu-ilmu sosial Barat yang melekat kuat dalam tradisi ilmu-ilmu sosial sejak abad ke-19 adalah antinomi antara konsep *nomotetik-ideografik*, dan universalitas-partikularisme. Apapun objek analisis ilmu sosial, variabel ruang dan waktu dalam sejarah kapitalisme di negara-negara nonbarat dalam dilema antara universalitas dan partikular, dan *nomotetik* versus *ideografis*, yang terus menerus menjadi perdebatan kritis hingga saat ini. ilmu-ilmu sosial tak luput dari hegemonisasi melalui struktur kapitalisme, sehingga tataran teoritis-metodologis, ilmu-ilmu sosial mengalami keterbatasan gerak (*terkooptasi*) oleh dominasi positivisme sebagai produk teoritik dari sistem kapitalisme. Positivisme yang menekankan aspek kuantitatif, empiris, dan *causal laws* telah mendominasi metodologi ilmu-ilmu

sosial sehingga memarginalkan metodologi antipositivisme yang lebih kualitatif, normatif, dan interpretatif. Ilmu-ilmu sosial, harus lebih kritis terhadap perkembangan kapitalisme saat ini. Dalam perkembangan dunia ilmu-ilmu sosial saat ini yang berada dalam iklim pascakolonial dan globalisasi, teori-teori yang menjelaskan keterbelakangan atau kegagalan dalam pembangunan sudah menunjukkan bahwa pada dasarnya modernisasi, kapitalisme bukan ideologi yang universal. Demikian, terima kasih atas banyak pihak kepada semua pihak yang sudah menjadi teman diskusi dan menginspirasi penulisan karya ini.

September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Ikhtisar	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. KAPITALISME DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF		
2.1 Pengantar	21
2.2 Isu-isu Kritis dalam Kapitalisme, Imperialisme dan Globalisasi	25
2.3 Teori Kapitalisme dalam Berbagai Perspektif		
1. Perspektif Marxis/NeoMarxis.....		31
2. Perspektif nonMarxis	37
3. Perspektif Poskolonial/ Kapitalisme Dunia Ketiga.....		40
2.4 Kapitalisme dan Legitimasi Akademik.....		45
BAB III. VARIAN TEORI KAPITALISME DUNIA KETIGA DAN KELEMAHANNYA		
3.1 Pengantar	53
3.2 Kapitalisme Model Asia Timur.....		55
3.3 Kapitalisme Model Asia Tenggara.....		57
3.4 Kapitalisme Model Amerika Latin.....		60
3.5 Teori Kapitalisme Negara:		

Tumbuhnya Konvergensi Gagasan	64
3.6 Kelemahan Teori Kapitalisme.....	67
 BAB IV. PRODUKSI PENGETAHUAN DAN KAPITALISME	
4.1 Pengantar	72
4.2 Teori Kapitalisme dan Ekspansi Kapitalisme pada Dunia Ketiga	74
4.3 Peran Universitas dalam Produksi Pengetahuan dan Ideologi	81
 BAB V. RELEVANSI STUDI DAN PRODUKSI KAPITALISME DALAM BIDANG TRANSPORTASI PUBLIK DI DUNIA KETIGA DAN DI INDONESIA	
5.1 Pengantar	94
5.2 Membangun Kapitalisme	95
 BAB VI. PENUTUP: INDEGENISASI KAPITALISME DI INDONESIA	
6.1 Kesimpulan	113
6.2 Kritik Teoretik	116
 DAFTAR PUSTAKA	120

Ikhtisar

Ada fenomena ideologisasi pengetahuan dibalik ideologisasi teknologi. Meski sudah lebih hampir seabad, kajian Ilmu-Ilmu Sosial umumnya, dan sosiologi khususnya menaruh perhatian pada persoalan tentang bagaimana negara-negara Barat membangun dan menciptakan teknologi untuk kemajuan dan kepentingan manusia, untuk merubah keadaan tradisional menjadi keadaan yang modern yang dikenal dengan masyarakat kapitalis, tetapi masih terbatas kajian yang mempersoalkan kapitalisasi pengetahuan atau teknologisasi pengetahuan bahkan pendalaman atas pembacaan fenomena ideologisasi pengetahuan. Hampir selama separuh abad itu, kajian sosiologi fokus membicarakan bagaimana masyarakat atau negara-negara terbelakang atau yang sedang berkembang bisa mengikuti langkah-langkah menuju masyarakat kapitalis maju, meskipun Dunia Ketiga pada akhirnya tidak berhasil sepenuhnya mengikuti tahap-tahap pemajuan pengetahuan menurut *mode of production* Barat/Dunia Pertama.

Semenjak abad ke-20, Ilmu-Ilmu Sosial di Dunia Ketiga dikuasai oleh teori modernisasi yang diklaim bersifat universal. Semenjak itu pula konsentrasi kajian ilmuwan sosial khususnya sebatas pada memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru, teknologi-teknologi baru yang disebarluaskan melalui *tekxbook-texbook*, hasil-hasil riset yang diasumsikan bisa membantu membebaskan keterbelakangan sebuah negara yang umumnya berada dibalahan bumi selatan yang dalam diskursus modernisasi dinamakan Dunia Ketiga. Tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Negara-negara Dunia Ketiga yang diberi preskripsi tentang cara-cara mengatasi keterbelakangan tidak bisa sepenuhnya mencapai kemajuan. Berawal dari situ maka beberapa ilmuwan sosial mulai mengalihkan

perhatiannya untuk mencari rumusan lain di luar Teori-Teori Modernisasi sebagai alat untuk mencapai kemajuan. Teori-teori modernisasi dan seluruh perangkat sistem ekonomi politik yang dibangun dalam kesatuan konsep kapitalisme mulai dipertanyakan, disangsikan sifat universalnya. Karena realitas pembangunan di Dunia Ketiga yang sudah mengadopsi sistem kapitalisme tidak menyebabkan adanya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, perkembangan industri atau bahkan demokrasi. Tetapi justru yang muncul adalah keterelakangan, ketergantungan pada negara-negara Barat penganjur modernisasi dan sistem kapitalisme.

Semenjak itu, dunia akademis mulai mencari rumusan jalan lain untuk membebaskan umat manusia dari keterbelakangan. Para ilmuwan dan intelektual dari disiplin ilmu sosial yang dikenal dengan Mazhab Frankfurt salah satu pelopor yang mengkritisi berbagai kelemahan dari sistem kapitalisme. Persoalan keterbelakangan, ketertinggalan ekonomi, kemiskinan, dan meningkatnya hutang Dunia Ketiga pada negara-negara Barat industrialis maju (Eropa, Amerika dan Jepang) bukan disebabkan tidak mempunyainya ilmuwan sosial itu menerapkan atau mereplikasi teori-teori Barat sesuai dengan konteks Dunia Ketiga, tetapi ada variabel lain yang berpengaruh terhadap keseluruhan proses adopsi teori-teori modernisasi dan sistem kapitalisme Barat itu. Ilmuwan-ilmuwan sosial bukannya mengkritisi tetapi justru menjadi perangkat dari kapitalisme internasional untuk melegitimasi sistem kapitalisme itu sebagai kebenaran universal, dan sebagai pengetahuan universal bahkan dipandang sebagai ideologi.

Studi yang mengkritisi sifat universal sistem kapitalisme sudah banyak dilakukan, tetapi studi yang mengeksplorasi tentang bagaimana sistem kapitalisme diproduksi diadopsi dan direplikasi atau direproduksi dalam konteks pembangunan negara-negara di Dunia Ketiga masih belum banyak dilakukan, khususnya berkenaan dengan penempatan sistem kapitalisme sebagai model pembangunan. Ada argumentasi lain, bahwa studi-studi tentang praktik sistem kapitalisme sudah banyak dilakukan oleh Yoshihara

Kunio, Peter L. Berger, Richard Robison, Andre Gunder Frank, James F. Petras, Arief Budiman, Vedi R Hadiz, yang semuanya menempatkan kapitalisme sebagai sistem ekonomi tak lain di Dunia Ketiga menjadi sistem neokolonialisme. Selain itu, kajian-kajian tentang sistem kapitalisme lebih banyak dilihat dari aspek praksis, dan pendekatan ekonomi politik atau politik ekonomi.

Studi ini coba mengeksplorasi masuknya upaya-upaya Dunia Pertama tidak hanya untuk melakukan ideologisasi pengetahuan, tetapi ideologisasi sistem kapitalisme dalam proses pembuatan kebijakan untuk kepentingan publik. Kasus yang dimbil adalah produksi kebijakan Bus Rapid Transit (BRT). Kapitalisme seakan-akan berubah menjadi sebuah sistem pengetahuan, terutama berkaitan dengan penempatannya sebagai model dalam replikasi kebijakan transportasi publik. Karena beroperasinya sistem kapitalisme di negara-negara Dunia Ketiga tak terlepas dari pengaruh peranan intelektual dan uiversitas. Universitas seringkali menjadi tempat untuk pengembangan pengetahuan-pengetahuan baru untuk kepentingan legitimasi rejim yang berkuasa atau kepentingan state.

Singkatnya, sistem kapitalisme dalam studi ini ditempatkan sebagai sistem pengetahuan yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Persoalan yang muncul kemudian adalah siapa saja aktor dalam replikasi model sistem kapitalis di negara-negara Dunia Ketiga tersebut. Bagaimana awal dari proses memproduksi pengetahuan sampai pada implementasi pengetahuan itu? Bagaimana peranan ilmuwan atau universitas dalam mengembangkan pengetahuan kapitalisme di negara-negara Dunia Ketiga umumnya? Jadi studi ini mengalisis keterlibatan universitas dan ilmuwan-ilmuwan sosial dalam memproduksi pengetahuan umumnya dan adopsi kebijakan publik khususnya. Alasannya, karena saat ini pengetahuan yang diproduksi oleh universitas cenderung tidak netral nilai. Ada kepentingan-kepentingan di balik pengetahuan yang diproduksi. Apakah sekarang pengetahuan itu sudah berubah menjadi ideologi?

Ilmu-ilmu sosial, harus lebih kritis terhadap perkembangan kapitalisme saat ini. Perlawanan terhadap kapitalisme tidak harus melalui gerakan buruh, karena musuh kapitalisme bukan hanya buruh sebagai pihak yang banyak dirugikan dari aktivitasnya, tetapi juga ilmuwan-ilmuwan social. Ilmuwan social/ntelektual menghadapi permasalahan dengan peranan strategisnya. Selama ini dukungan terhadap kapitalisme tidak berarti menyudahi peranan dan mengakhiri pemikiran kritisnya, tetapi justru ilmuwan social masih memiliki peranan untuk membangun kembali eksistensinya khususnya dalam membangun atau memproduksi pengetahuan yang sesuai dengan kondisi tempatnya berada.

Tantangan yang dihadapi ilmuwan social saat ini dapat dilihat dari praktek, karya dan pemikirannya, terutama teori yang dihasilkan dan dikembangkan saat ini berasal dari kritikan, penafsiran, dan deskripsi dari hasil pekerjaan yang telah dihasilkan dan berhasil membangun opini masyarakat sehingga timbul pemahaman baru dan pengetahuan baru. Dalam perkembangan dunia ilmu-ilmu sosial saat ini yang berada dalam iklim pascakolonial dan globalisasi, teori-teori yang menjelaskan keterbelakangan atau kegagalan dalam pembangunan sudah menunjukkan bahwa pada dasarnya modernisasi, kapitalisme bukan ideologi yang universal. Produksi pengetahuan yang berbasis pada kondisi internal masyarakat dan negara dapat memberikan kontribusi signifikan pada pembaruan pengetahuan dan teknologi, daripada terus menerus menerima atau mengadopsi pengetahuan tanpa basis pengetahuan internal yang ada dalam masyarakat dan negara.

Dalam kondisi pascakolonial dan kapitalisme lanjut, kritisisme pengetahuan yang diproduksi Barat melalui kerja-kerja ilmuwan social sudah saatnya diganti dengan idegenisasi pengetahuan yang memasukkan factor-faktor internal masyarakat dan negara..

BAB I

Pendahuluan

Meski sudah lebih hampir seabad, kajian Ilmu-ilmu Sosial umumnya, dan sosiologi khususnya menaruh perhatian pada persoalan tentang cara negara-negara Barat membangun dan menciptakan teknologi untuk kemajuan dan kepentingan manusia, untuk merubah keadaan tradisional menjadi keadaan yang modern yang dikenal dengan masyarakat kapitalis, tetapi masih terbatas kajian yang mempersoalkan kapitalisasi pengetahuan atau teknologisasi pengetahuan bahkan pendalaman atas pembacaan fenomena ideologisasi pengetahuan. Hampir selama separuh abad itu, kajian sosiologi fokus membicarakan bagaimana masyarakat atau negara-negara terbelakang atau yang sedang berkembang bisa mengikuti langkah-langkah menuju masyarakat kapitalis maju, meskipun Dunia Ketiga pada akhirnya tidak berhasil sepenuhnya mengikuti tahap-tahap pemajuan pengetahuan menurut *mode of production* Barat (Dunia Pertama).

Pendekatan yang memadai untuk memahami sejarah Ilmu-ilmu Sosial Barat yang melekat kuat dalam tradisi Ilmu-ilmu Sosial sejak abad ke-19 adalah antinomi antara konsep nomotetik-ideografik dan universalitas-partikularisme yang diusulkan oleh Immanuel Wallerstein.¹ Pemunculan atau penamaan disiplin akademis merefleksikan kemenangan kekuasaan ideologi liberal. Argumentasinya adalah pusat perhatian dari proses sosial itu berhasil dalam meniadakan tiga cakupan meliputi pasar, negara, dan yang pribadi. Studi dari tiga lingkup tersebut terpisah yang

¹ Immanuel Wallerstein, (2004). *The Uncertainties of Knowledge*, Philadelphia, Temple Univ. Press.

dinamakan ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi. Wallerstein memberi julukan disiplin tersebut sebagai nomotetik, dan untuk semuanya mencapai hukum-hukum universal yang diaplikasikan melampaui waktu dan tempat.

Paralel dengan pernyataan di atas, mempelajari sejarah teori-teori Barat seperti modernisasi, kapitalisme tak terlepas dari klaim-klaim universalitasnya. Apapun objek analisis ilmu sosial, variabel ruang dan waktu dalam sejarah kapitalisme di negara-negara nonbarat dalam dilema antara universalitas dan partikular, dan nomotetik versus ideografis, yang terus menerus menjadi perdebatan kritis hingga saat ini. ilmu-ilmu sosial tak luput dari hegemonisasi melalui struktur kapitalisme, sehingga tataran teoritis-metodologis, ilmu-ilmu sosial mengalami keterbatasan gerak (terkooptasi) oleh dominasi positivisme sebagai produk teoritik dari sistem kapitalisme. Positivisme yang menekankan aspek kuantitatif, empiris, dan *causal laws* telah mendominasi metodologi ilmu-ilmu sosial sehingga memarginalkan metodologi antipositivisme yang lebih kualitatif, normatif, dan interpretatif.

Pendekatan keilmuan yang berpusat pada Barat ditanggapi oleh Wallerstein sebagai bagian dari pertanyaan ilmuwan yang mempertanyakan indegenisasi ilmu-ilmu sosial itu di Dunia Ketiga. Hal yang utama sebagai sebuah respon Dunia Ketiga, oposisi secara eksplisit pada importasi (pemasukan) model-model yang tidak cocok dengan perkembangan ilmu sosial yang ada dan untuk Dunia Pertama, yang memberikan penekanan pada penemuan inspirasi tersebut.² Karena itu, teori-teori yang berpusat pada Barat dalam implemetasinya di Dunia Ketiga tak luput dari dilema itu. Pembelaan akademis yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial Dunia Pertama terbukti tidak bisa menyudahi dilema itu, bahkan selalu menjadi diskursus tanpa berkesudahan, dan tidak jarang pula, ilmuwan-ilmuwan sosial Dunia Pertama sebagai pelopor yang memulai untuk mengkritisi relevansi teori-

2 Martin Albrow dan Elizabeth King (eds.), (1990). *Globalization, Knowledge and Society*. London: Sage Pub.

teori tersebut hingga saat ini terus bergelut dalam membangun paradigma-paradigma lain sebagai alternatif untuk menjelaskan realitas empiris yang ada di negara tersebut. Hal ini tak lain sebagai pembongkaran epistemologis pengetahuan Barat dan sekaligus positivisme untuk digantikan dengan epistemologis pengetahuan lain yang dapat mendekatkan upaya untuk mempribumikan teori-teori yang memiliki asal muasal dari Barat (Dunia Pertama) di Dunia Ketiga.

Persoalan epistemologi dan ontologi merupakan bagian dari analisis kritis dari kerja-kerja ilmiah para ilmuwan-ilmuwan Dunia Pertama dan Dunia Ketiga. Berbagai pendekatan, teori, konsep baru bermunculan. Pendekatan atau paradigma modern menurut teoretisi Mazhab Kritis sudah berakhir. Michel Foucault sebagai pelopor aliran pascastrukturalis coba mengkritisi paradigma modernisme tersebut.³ Paradigma yang menguasai dan membentuk cara berpikir linear dan biner telah gagal menjelaskan proses produksi pengetahuan kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang bersifat universal dan dapat diadopsi oleh negara manapun terutama adalah negara-negara Dunia Ketiga. Deretan panjang diskursus secara bergantian mulai dari modernisasi, pascamodernisasi, pascakolonial memuat tentang metamorfosis kapitalisme dalam berbagai bentuknya.

Foucault mempertimbangkan semua pengetahuan arbiter, termasuk penyebutan kebenaran, untuk mempertahankan hubungan dan fungsi struktur kekuasaan. Ada masalah dengan konsepsi Foucault, jika salah memahami hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan saat mengasumsikan bahwa banyak pengetahuan yang cocok bagi kekuasaan yang mungkin disebut hanya sebagai pengetahuan yang benar-benar salah. Apa yang saya tanyakan dari pengetahuan atau apa yang saya temukan dalam pengetahuan memungkinkan untuk berharap otoritasnya untuk mengatakan bahwa produksi pengetahuan baru menjadi satu atau

3 Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings 1972-1977*. Colin Gordon (ed.). 1980, New York: Pantheon Books.

bergabung dengan korporasi, disiplin dan kekuasaan administrasi.

Foucault melanjutkan kritiknya dengan menjelaskan bahwa kemungkinan ada suatu perbedaan nyata antara produksi pengetahuan yang berasal dari sebuah diskursus ekonomi dan pemahaman epistemologi tradisional, yang menjelaskan bahwa Foucault perlu menjelaskan atau mendefinisikan metode epistemologinya, karena ada variabel lingkungan dari sekadar masyarakat, dan lebih dari pengetahuan yang sekadar diskursus. Jika semua pengetahuan dan karenanya kekuasaan, ini dengan kuat berhubungan dengan sebuah pemahaman epistemologi, bagaimana dapat mengetahui sesuatu yang lebih kurang dikontrol oleh kekuasaan.⁴

Pengetahuan itu memiliki obyek, terutama menyangkut tentang apa yang diketahui, dan yang lainnya sebagai orang yang menerima pengetahuan sebagai kebenaran. Secara epistemologis, kapitalisme Dunia Pertama tidak sama dengan kapitalisme Dunia Ketiga, karena di Dunia Ketiga, kapitalisme mempunyai wajah ganda, di satu sisi sebagai alat mencapai kemajuan sekaligus keterbelakangan. Kapitalisme Dunia ketiga berjalan bersamaan dengan seiring dengan proses penyebaran ideologi modernisasi, developmentalis dan globalisasi, yang tidak lain adalah proses neo-kolonialisme. Revitalisasi kapitalisme sebagai moda produksi terus menerus dalam proses transformasi.⁵

4 Michel Foucault. (1969). *The Archeology of Knowledge*. Routledge.

5 Dalam proses tersebut terjadi eksploitasi sumberdaya (bahan mentah dan bahan baku) terhadap negara-negara yang diasumsikan oleh Barat sebagai negara yang bukan kapitalis yang tidak lain adalah negara Dunia Ketiga. Konsep Dunia Ketiga digunakan untuk menggambarkan sejumlah besar masyarakat yang mengalami pemiskinan, yang salah jika memandangnya sebagai kemiskinan yang penyebabnya tidak dikaitkan dengan kekayaan relatif Dunia Pertama (the First World). Konsep Dunia Pertama merupakan perpektif skala global untuk memahami pola kekayaan sumberdaya dan kesulitan yang ada di dunia. Lihat *Introduction to the Sociology Development*, Andrew Webster (1988), London: MacMillan Education.

Di Dunia Ketiga, kapitalisme memiliki banyak ragam, artinya replika-replika kapitalisme di Dunia Ketiga, baik di Asia maupun Amerika Latin memiliki keunikan masing-masing, dan hal itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, internal maupun eksternal. Secara implisit, dapat dikatakan bahwa kapitalisme tidak pernah menyerupai bentuk aslinya. Proses replikasi sebagai sebuah proses sosial, ekonomi dan politik melibatkan peranan aktor-aktor universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan elite-elite ekonomi politik dan pemerintah termasuk birokrasi.

Dengan demikian, makalah ini coba memaparkan secara kritis epistemologi kapitalisme Dunia Ketiga. Klaim-klaim sistem kapitalisme yang universal tak terpisah dari membenaran metodologi positivis ilmiah yang mendukung kerja-kerja intelektual atau ilmuwan sosial. Ada hal lain yang tersembunyi dibalik klaim Dunia Pertama tentang universalitas kapitalisme, yaitu kapitalisme itu berkembang searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ia adalah produk masa pencerahan, yang menempatkan rasio di atas segalanya, ia sebagai kebenaran tunggal. Perkembangan kapitalisme sebagai sebuah sistem pengetahuan terus diproduksi oleh ilmuwan-ilmuwan Dunia Pertama yang memang sedang mencari penjelasan atas peristiwa di masa sebelumnya, yaitu jaman Kegelapan (Abad Pertengahan).

Klaim-klaim kebenaran disusun atas dasar pemilik otoritas keilmuan, tidak lagi disusun oleh pemilik otoritas metafisik (namanya apa). Seiring dengan upaya untuk membangun otoritas, dan mencari kebenaran atau pembebasan atas masa kegelapan yang telah menghancurkan sebagian peradaban manusia, maka para ilmuwan tanpa henti terus membangun pengetahuan untuk menjadi ilmu pengetahuan dan memperoleh status sebagai kebenaran.⁶ Proses perkembangan sejarah keilmuan yang ditengarai dari peristiwa Abad Kegelapan tak bisa dipisahkan dari proses kelahiran

6 Max Weber, (1978), *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, dalam Guenter Roth dan Claus Wittich (ed.), Univ. of California Press, Berkeley, California.

kapitalisme itu sendiri. Di Dunia asalnya, kapitalisme bukan sesuatu yang ahistoris. Ketika sistem kapitalisme disebarluaskan sebagai sesuatu yang bisa membebaskan manusia dari masa kegelapan, tidak memperoleh hasil yang sama. Kapitalisme tidak bisa membebaskan keterbelakangan Dunia Ketiga. Kapitalisme di Dunia Ketiga bukan sesuatu yang ahistoris. Singkat kata, abad Pertengahan bisa dianggap mewakili corak baru bentuk-bentuk eksploitasi tersebut dalam wujud imperialisme dan kolonialisme.

Dunia Ketiga adalah bekas koloni Dunia Pertama, sehingga cara membebaskan Dunia Ketiga tidak harus dengan cara modernisasi atau menerapkan kapitalisme. Kapitalisme sebagai sebuah produk pengetahuan yang terus menerus dikampanyekan oleh Dunia Pertama bukan tindakan yang tidak disengaja, melainkan sebagai sebuah proses yang bersifat akademik, ilmiah dan karenanya adalah sengaja. Semenjak itu, abad ke-20, Ilmu-ilmu Sosial di Dunia Ketiga dikuasai oleh Teori Modernisasi yang diklaim bersifat universal. Semenjak itu pula konsentrasi kajian ilmuwan sosial khususnya memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru, teknologi-teknologi baru yang disebarluaskan melalui *textbook-textbook*, hasil-hasil riset yang diasumsikan bisa membantu membebaskan keterbelakangan sebuah negara yang umumnya berada dibalahan bumi selatan yang dalam diskursus modernisasi dinamakan Dunia Ketiga, yang dalam kenyataannya tidak demikian.

Negara-negara Dunia Ketiga yang diberi preskripsi tentang cara-cara mengatasi keterbelakangan tidak bisa sepenuhnya mencapai kemajuan. Berawal dari situ maka beberapa ilmuwan sosial mulai mengalihkan perhatiannya untuk mencari rumusan lain di luar teori-teori modernisasi sebagai alat untuk mencapai kemajuan. Teori-teori modernisasi dan seluruh perangkat sistem ekonomi politik yang dibangun dalam kesatuan konsep kapitalisme mulai dipertanyakan, disangsikan sifat universalnya. Karena realitas pembangunan di Dunia Ketiga yang sudah mengadopsi sistem kapitalisme tidak menyebabkan adanya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, perkembangan industri atau bahkan

demokrasi. Tetapi justru yang muncul adalah keterelakangan, ketergantungan pada negara-negara Barat penganjur modernisasi dan sistem kapitalisme.

Semenjak itu, dunia akademis mulai mencari rumusan jalan lain untuk membebaskan umat manusia dari keterbelakangan. Para ilmuwan intelektual dari disiplin ilmu sosial yang dikenal dengan Mazhab Frankfurt salah satu pelopor yang mengkritisi berbagai kelemahan dari sistem kapitalisme. Persoalan keterbelakangan, ketertinggalan ekonomi, kemiskinan, dan meningkatnya hutang Dunia Ketiga pada negara-negara Barat industrialis maju (Eropa, Amerika, dan Jepang) bukan disebabkan tidak mempunya ilmuwan sosial itu menerapkan atau mereplikasi teori-teori Barat sesuai dengan konteks Dunia Ketiga, tetapi ada variabel lain yang berpengaruh terhadap keseluruhan proses adopsi teori-teori modernisasi dan sistem kapitalisme Barat itu. Ilmuwan-ilmuwan sosial bukannya mengkritisi tetapi justru menjadi perangkat dari kapitalisme internasional untuk melegitimasi sistem kapitalisme itu sebagai kebenaran universal dan sebagai pengetahuan universal bahkan dipandang sebagai ideologi.

Studi yang mengkritisi sifat universal sistem kapitalisme sudah banyak dilakukan, tetapi studi yang mengeksplorasi tentang bagaimana sistem kapitalisme diproduksi diadopsi dan direplikasi atau direproduksi dalam konteks pembangunan negara-negara di Dunia Ketiga masih belum banyak dilakukan, khususnya berkenaan dengan penempatan sistem kapitalisme sebagai model pembangunan. Ada argumentasi lain, bahwa studi-studi tentang praktik sistem kapitalisme sudah banyak dilakukan, yaitu Yoshihara Kunio, Yoon Hwan Shin, Peter L. Berger, Richard Robison, Andre Gunder Frank, dan lain-lainnya. Selain itu, kajian-kajian tentang sistem kapitalisme lebih banyak dilihat dari aspek praksis, dan pendekatan ekonomi politik atau politik ekonomi.⁷ Gunder Frank

⁷ Lihat kembali karya Yoshihara Kunio (1990), *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Peter Berger, *Revolusi Kapitalis* (1990), LP3ES, Jakarta. Richard Robison, *The Rise of Capital* dan Richard and Vedi R. Hadiz. (2004), *Reorganising Power*

dengan teori Ketergantungan Dunia Ketiga (the Third World Dependency) sebagai salah satu teoretisi Ketergantungan yang pada tahun 1960-an bersama sejumlah akademisi dan ekonom pembangunan yang kritis dan peduli dengan kelangsungan kegagalan ekonomi di negara-negara Amerika Latin, yang memandang modernisasi tak memberi manfaat pada Dunia Ketiga.⁸

Studi ini berfokus pada eksplorasi sistem kapitalisme sebagai sebuah sistem pengetahuan, terutama berkaitan dengan penempatannya sebagai model dalam replikasi kebijakan transportasi publik. Karena beroperasinya sistem kapitalisme di negara-negara Dunia Ketiga tak terlepas dari pengaruh peranan intelektual dan universitas. Universitas seringkali menjadi tempat untuk pengembangan pengetahuan-pengetahuan baru untuk kepentingan legitimasi rejim yang berkuasa atau kepentingan state.⁹

Singkatnya, sistem kapitalisme dalam studi ini ditempatkan sebagai sistem pengetahuan yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Persoalan yang muncul kemudian adalah siapa saja aktor dalam replikasi model sistem kapitalis di negara-negara Dunia Ketiga tersebut. Bagaimana awal dari proses memproduksi pengetahuan sampai pada implementasi pengetahuan itu? Bagaimana peranan ilmuwan atau universitas dalam mengembangkan pengetahuan kapitalisme di negara-

in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an Age of Markets, London, Routledge. Yoon Hwan Shin (1989), *Demyistifying the Capitalist State: Political Patronage, Bureaucratic Interest, and Capitalist in Formation in Soeharto's Indonesia*, a dissertation to the Faculty of the Graduate School of Yale University). Gunder Frank (1967, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, New York, Montly Review Press).

- 8 Lihat kembali Andre Gunder Frank. (1971). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, Harmondsworth, Penguin.
- 9 O'Donnell, G. and Philippe C. Schmitter. (1986). 'Tentative Conclusions about Uncertain Democracies' in Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead (eds) *Transitions from Authoritarian Rule: Prospect for Democracy*, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 3-72

negara Dunia Ketiga umumnya? Kajian ini menganalisis keterlibatan universitas dan Ilmuwan-ilmuwan Sosial dalam memproduksi pengetahuan umumnya dan adopsi kebijakan publik khususnya. Alasannya, karena pengetahuan yang diproduksi oleh universitas cenderung tidak netral nilai. Ada kepentingan-kepentingan dibalik pengetahuan yang diproduksinya. Apakah sekarang pengetahuan itu sudah berubah menjadi ideologi?

Herbert Marcuse dalam karyanya yang monumental '*One Dimensional Man*' mengatakan bahwa kapitalisme yang didorong oleh teknologi telah berkembang untuk mengisi semua ruang sosial, dan menjadi suatu semesta politis, dan kekuasaan totalitarian berfungsi untuk mempertahankan hegemoninya dengan menghilangkan fungsi kritisnya dari semua oposisi, yaitu kemampuannya berpikir negatif mengenai sistem, dan dengan memaksakan kebutuhan-kebutuhan palsu melalui kendali pasar, iklan dan juga media.¹⁰ Karena itu, kebebasan itu sendiri menjadi alat dominasi, dan akal menyembunyikan sisi irasionalitas. Horkheimer mencermati adanya perbedaan antara mitos masyarakat purba dan pengetahuan rasional versi Abad Pencerahan tidak terletak pada tataran yang esensial, melainkan terletak pada aspek pendekatannya saja.

Dalam pandangan Habermas, teknologi telah menjadi sebuah ideologi yang bekerja di latar belakang dalam masyarakat teknokratis. Di lain pihak, ia juga melihat kecenderungan fetisisme ilmu dalam masyarakat kontemporer sebagai kecenderungan bergesernya ilmu menjadi satu bentuk ideologi baru. Kesimpulan Habermas harus dilihat sebagai sebuah kritik yang jauh lebih optimistis dibanding para peletak dasar teori kritis mahzab Frankfurt lainnya. Bagi Habermas, munculnya ilmu dan teknologi sebagai kekuatan pemberi legitimasi baru bukan hanya menandai transformasi dari bentuk-bentuk ideologi tradisional menjadi sebuah ideologi yang modern dan rasional, melainkan juga sebagai

¹⁰ Marcuse, H. (1991), *One Dimensional Man*, Boston: Beacon Press.

tanda mulai munculnya kritik ideologi.¹¹

Ilmu-ilmu sosial, harus lebih kritis terhadap perkembangan kapitalisme saat ini. Perlawanan terhadap kapitalisme tidak harus dengan gerakan buruh, karena musuh kapitalisme bukan hanya buruh sebagai pihak yang banyak dirugikan dari aktivitasnya, tetapi juga intelektual. Intelektual memiliki peranan strategis, yang selama ini telah turut menjadi kekuatan yang menghegemoni publik. Tantangan dalam dunia intelektual khususnya ilmuwan sosial saat ini dapat dilihat dari praktek, karya dan pemikirannya. Teori yang dihasilkan dan dikembangkan saat ini berasal dari kritikan, penafsiran, dan deskripsi dari hasil pekerjaan yang telah dihasilkan dan berhasil membangun opini masyarakat sehingga timbul pemahaman baru dan pengetahuan baru.

Dalam perkembangan dunia ilmu-ilmu sosial saat ini yang berada dalam iklim poskolonial dan globalisasi, teori-teori yang menjelaskan keterbelakangan atau kegagalan dalam pembangunan sudah menunjukkan bahwa pada dasarnya modernisasi bukan ideologi yang universal. Robison menunjukkan beberapa proposisi yang muncul sebagai paradoks, diantaranya adalah:¹²

“The neoliberal project must be understood not just as a technical attempt to transplant an abstracted and self-regulated market mechanism but as an agenda for broader social transformation realised or negotiated in conflicts between contending alliances of supporters of beneficiaries to define the rules of markets. In this circumstance, programmes of deregulation and privatisation have, in several critical instances, been successfully hijacked to underpin the development and consolidation of powerful leagues

11 Tim Dant.(1991), *“Knowledge, Ideology and Discourse, A Sociological Perspective”*, Routledge, NY.

12 Richard Robison, *Neo-Liberalism and the Future World: Market and the End of Politics, Inaugural Address as Professor of Political Economy delivered on 5 February 2004 at the Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands, ISS Public Lecture Series 2004, No. 1.*

of privileged oligarchy and illiberal forces, able to reorganise themselves in new market and democratic institutions. Global financial and capital markets have also been able to accommodate, in important instances, to economies where rents and state intervention are central elements. At the same time, neo-liberal reformers have progressively found, as Polanyi observed, that, '... there was nothing natural about laissez-faire: free markets could never come into being by merely allowing things to take their course. The road to the free market was opened and kept open by an enormous increase in continuous and centrally organised and controlled interventionism.' (Polanyi 1944: 139, 140). *The task of the neo-liberals increasingly became that of 'protecting the market from politics', drawing them inexorably towards a Hobbesian world of 'authoritarian or regulatory liberalism'. Finally, the critical shifts towards neo-conservative policies and the increasing importance of security and empire in US global agendas has not fundamentally supplanted neo-liberal orthodoxy but ushered it into a new geo-political framework defined increasingly by strategic cartels and bilateral partnerships.*

Penjelasan tentang kegagalan pembangunan tak hanya terlihat dari aspek fisik, seperti kemiskinan, tetapi juga merambah aspek yang lain, yaitu keilmuan. Ilmu-ilmu sosial bekerja bukan hanya untuk mendukung kekuasaan atau ideologi dominan. Jika hal ini ditemukan dalam kenyataan maka Ilmu-Ilmu Sosial sudah dapat dipastikan tidak bebas nilai. Padahal sebagai sebuah ilmu, Ilmu Sosial menghasilkan kebijakan dan bersifat netral ideologi. Tidak berpihak pada kekuatan-kekuatan ideologis, tetapi berpihak pada publik.¹³ Karena itu, pengetahuan mengandung kuasa. Maksudnya, gagasan tersebut menjadi kekuatan yang dapat menaklukkan kesadaran orang untuk mengikuti gagasan dan konsep tersebut. Apalagi jika gagasan tersebut menjadi wacana dominan dan

¹³ Sven-Ake Lindgren, "Michel Foucault", (2000). *Classical and Modern Social Theory*. Ed. Anderson, Heine and Lars Bo Kasperon. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers.

hegemonik, ia akan dengan cepat dan tanpa perlawanan diambil setiap orang sebagai miliknya sendiri. Pengetahuan yang hegemonik mampu mengontrol, mengarahkan, dan meminta seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang diinginkan.

Faktor modernisasi dalam wacana kapitalisme lanjut ini tidak terjebak pada dikotomi kapitalis sebagai pemilik modal dan buruh sebagai faktor produksi, melainkan berlanjut pada wacana bagaimana akhirnya pekerja dihadapkan pada masalah kepemilikan bersama (*share holder*) dalam sebuah proses kapitalisasi yang tetap saja memberikan ruang pada keuntungan dan proses akumulasi investasi.

Berakhimya era kolonialisme, dunia memasuki era 'neokolonialisme,' dimana modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik dan secara langsung melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi. Fase kedua ini dikenal sebagai era *developmentalism*. Periode ini ditandai dengan masa kemerdekaan negara-negara Dunia Ketiga secara fisik. Namun, pada era ini dominasi negara-negara bekas penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap dilanggengkan melalui kontrol terhadap teori dan proses perubahan sosial. Dalam kaitan itulah, sesungguhnya teori pembangunan ataupun paham *developmentalism* menjadi bagian dari media dominasi, karena teori tersebut direkayasa untuk menjadi paradigma dominan untuk perubahan sosial Dunia Ketiga oleh negara Utara.

Pada fase kedua itu, kolonialisasi tidak terjadi secara fisik, melainkan melalui hegemoni berupa dominasi cara pandang dan ideologi serta *discourse* yang dominan melalui produksi. Terlihat dalam sekilas sejarah dimana kapitalisme sebagai sebuah ideologi dan praktek sosial telah teruji dengan berbagai tantangan dan ujian. Ramalan Karl Marx tentang kontradiksi dalam kapitalisme tidak pernah terbukti secara empiris. Justru kapitalisme menampakkan diri sebagai ide yang semakin berkembang, cepat menyebar, kritis dengan dirinya sendiri, lentur dan fleksibel. Apa sebabnya? Para pendukung tesis kapitalisme negara di Dunia Ketiga memiliki keyakinan tentang kemajuan negara-negara kapitalis. Mereka

memaparkan argumentasinya bahwa kemajuan itu karena ada intervensi besar negara melalui nasionalisasi perusahaan dan pengenalan perencanaan negara.

Teori-teori pembangunan mulai berkembang dalam tataran akademis maupun aksi, setelah perang Dunia Kedua, bersamaan dengan negara-negara di belahan bumi Selatan yang sedang mencari pola pembangunannya sendiri. Pembangunan negara-negara Dunia Ketiga juga berada dalam pengaruh Amerika Serikat sebagai negara yang merasa sangat berkepentingan dengan pembangunan negara-negara dunia ketiga di Asia dan Afrika. Kedudukan Amerika Serikat dapat dipandang unik, karena selain sebagai tempat berlangsungnya perdebatan Teori-teori Pembangunan, namun sekaligus juga sebagai negara kapitalis yang terbesar di dunia.

Para pendukung Teori Modernisasi meyakini bahwa Dunia Ketiga perlu mencontoh Barat. Dalam perkembangan teori modernisasi di Dunia Ketiga benar-benar berkembang sangat pesat, dan hal ini telah menempatkan ilmu-ilmu sosial sebagai yang universal, karena sifatnya yang dapat diterapkan karena sifatnya yang dapat menjelaskan, meramalkan, mengatasi (memberi solusi) terhadap masalah yang dihadapi negara itu dimanapun juga. Di Barat Teori Modernisasi menjadi keniscayaan, sebagai paradigma universal yang tak terbantahkan, sehingga bisa diterapkan di negara Dunia Ketiga sebagai negara nonBarat juga. Asumsi demikian ini telah menghantarkan Dunia Ketiga untuk mengadopsi Teori Modernisasi sebagai formula universal yang bisa mengatasi persoalan khususnya keterbelakangan ekonomi yang dihadapi negara Dunia Ketiga. Keyakinan ini telah terbukti dengan munculnya Jepang sebagai negara di Asia yang bisa maju, berkembang pesat dan mengaplikasikan model pembangunan negara-negara Barat umumnya.

Dari perspektif sosiologi, pembacaan bahwa sejak tahun 1980-an, universalitas teori Modernisasi terus mendapatkan tantangan dari ahli-ahli ilmu sosial dan sosiolog khususnya. Karena Dunia

Ketiga yang sudah memilih paradigma modernisasi ternyata bukan sebagai keniscayaan. Asumsi dasar teori modernisasi bahwa kemiskinan bersumber pada faktor-faktor internal suatu negara itu adalah salah. Karena sesungguhnya, kekuatan-kekuatan luar telah menyebabkan suatu negara gagal menjalankan pembangunannya. Dalam hal ini upaya pemberantasan kemiskinan dan pembangunan negara di Dunia Ketiga tidak akan berhasil jika struktur hubungan antara negara-negara maju (Barat) dan negara-negara miskin tidak diubah. Sebab, struktur hubungan itu tidaklah sejajar, karena negara-negara maju cenderung bersifat hegemonik dan eksploitatif terhadap mitra-mitranya yang lebih lemah. Teori ketergantungan, yang merupakan varian dari teori struktural.

Ada perspektif atau pendekatan lain dalam ilmu-ilmu sosial yang menjelaskan ketergantungan dan keterbelakangan Dunia Ketiga. Teoretisis-teoretisi pembangunan aliran struktural membedah persoalan internal suatu negara dengan perspektif yang lebih kritis, yaitu pendekatan ekonomi politik. Perkembangan ini memiliki implikasi yang signifikan pada studi tentang masyarakat-masyarakat nonbarat (Dunia Pertama), karena pemikiran-pemikiran itu membuka ruang teoretis yang mengakui nonbarat sebagai pencipta teori dan pengetahuan, daripada hanya sebagai perangkat-perangkat respons terhadap bentuk-bentuk universal. Ada upaya untuk bertumpu pada orientasi itu. Berbagai penelitian tentang masyarakat dan kebudayaan di Asia Tenggara sampai pada suatu proposisi tentang perlunya meninggalkan perspektif yang berorientasi Barat dan kapitalisme. Sebaliknya, fokus perhatian ditujukan pada hal-hal khusus tentang ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan-kebutuhan nasional yang menjadi prioritas masyarakat dan kebudayaan itu sendiri. Berkembang minat perhatian yang semakin besar pada sejarah lokal, kebudayaan, dan struktur-struktur sosial, serta kaitannya dengan kekuatan-kekuatan nasional dan global. Kajian ini bertujuan untuk memahami pandangan yang berbeda tentang rasionalitas dan kapitalisme dalam upaya mereproduksi, menerjemahkan, dan mengubah bentuk-bentuk Barat/eksternal.

Buku ini mendiskusikan debat yang muncul dari pendekatan-pendekatan yang sudah ada sekaligus untuk mengkaji ulang lokal dan global sebagai kategori-kategori yang simultan dan saling terkait, yang menjadikan apa yang lokal dan spesifik itu juga sebagai yang global dan komparatif, dan memberikan paradigma alternatif dalam memahami hubungan antara Dunia Ketiga dan Barat. Lebih khusus lagi, saat ini, bagaimanapun juga isu-isu yang sangat menarik perhatian adalah apakah globalisasi akan berlanjut dalam suatu era poskolonial bebas mengadopsi ideologi kapitalis. Ini merefleksikan meningkatnya kita untuk berpikir secara global, mengakui bahwa perubahan-perubahan sosial bisa dipertimbangkan dalam beberapa bagian dunia, terdapat proses overarching dan transformasi yang berjalan dalam level global yang berdampak pada setiap orang dan yang lainnya.

Teori-teori kapitalisme terus berkembang dalam banyak variannya, sehingga tidak relevan menjelaskan persoalan yang dihadapi Dunia Ketiga sekarang hanya dengan mengutuk praktik-praktik neoliberalisme. Konsekuensinya, diperlukan alternatif teori baru yang bisa menjeskan dengan sistematis ilmiah realitas pembangunan dan *transfer of technology* di Dunia Ketiga. Apakah tidak ada alternatif di luar mekanisme pasar bebas, atau adakah alternatif pembangunan yang memikirkan *tacit knowledge* masyarakat, sehingga yang menjadi aktor pembangunan bukan hanya *state* dan *market*, tetapi juga *society*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut setidaknya telah menantang secara intelektual, meski bukan untuk untuk kebutuhan praksis gerakan.

Berdasarkan rekaman sejarah, terdapat sejumlah alternatif pembangunan ekonomi di luar sistem kapitalisme-neoliberal. Pertama, adalah sistem sosialisme dimana ide dasarnya adalah menempatkan proses produksi dan pemasaran di bawah kontrol kelas pekerja. Dengan demikian, kelas pekerja tidak hanya menjual tenaga kerjanya tapi juga, menguasai dan mengontrol hasil kerjanya. Saat ini, sistem ekonomi sosialis beroperasi secara teorganisir di Kuba. Tetapi secara umum, pasca keruntuhan model

Uni Sovyet, sistem ekonomi sosialis telah dianggap sebagai masa lalu yang masih harus membuktikan keunggulannya di hadapan ekonomi pasar bebas.

Pelacakan terhadap sejarah pembangunan di Dunia Ketiga, dapat digunakan untuk menggambarkan bahwa sebagian negara menolak sistem kapitalisme, dan sebagian lagi menerima sistem kapitalisme. Di antara sikap menerima dan menolak, terdapat penyesuaian-penyesuaian, dimana konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik menjadi pertimbangannya. Bahkan di Jepang, yang sering menjadi contoh keberhasilan pembangunan ekonomi dan transfer of knowledge kapitalisme di negara Asia, adalah negara yang bisa merumuskan kembali kapitalisme dengan basis sistem nilai Jepang dan memasukkan variabel *tacit knowledge*.

Frank menunjukkan dengan kekayaan fakta dan sejarah, tiada bahagian di Amerika Latin yang tidak disentuh oleh hubungan pasar. Penarikan ke dalam sistem dunia kapitalis membawa kepada pembangunan di dalam beberapa sektor dan "*development of underdevelopment*" di tempat lain. "*Development of underdevelopment*" berlaku di dalam sistem dunia kapitalis yang dicirikan dengan struktur metropolis-satelit.¹⁴ Dalam membincangkan teori ketergantungan, penting sekali teori sistem dunia oleh Wallerstein disentuh kerana pendapat bahawa sistem sosial perlu dilihat secara menyeluruh dan negara bangsa di dalam dunia modern juga tidak boleh dikaji secara tersendiri kerana ia bukan satu sistem tertutup. Wallerstein menyatakan sistem dunia moden adalah kapitalis kerana ia adalah sistem ekonomi. "*Capitalism and a world economy (that is, a single division of labour but multiple polities) are obverse sides of the same coin. One does not cause the other. We are merely defining the same indivisible phenomenon by the different characteristics.*"¹⁵

14 Lihat Frank. *Op.Cit.* Capitalism and Underdevelopment in Latin America.

15 I. Wallerstein. (1980), *The Capitalist World Economy*, London, Cambridge Univ. Press.

Pembangunan atau pembentukan pengetahuan sebagaimana dikemukakan oleh Nonaka dan Takeuchi (1995), pengetahuan dapat terbentuk melalui empat mode, yaitu sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi. Keempat mode ini membentuk suatu putaran (siklus) yang oleh Nonaka dan Takeuchi disebut sebagai *positive knowledge spiral*, dimana pengetahuan (*knowledge*) dalam suatu organisasi/lembaga/perusahaan pada awalnya berasal dari individu, kemudian ditransformasikan ke kelompok, selanjutnya ke organisasi dan akhirnya antar organisasi.¹⁶

Dengan teori ini terdapat istilah *tacit knowledge* dan *explicit knowledge*, meskipun pada beberapa literatur disebutkan, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Polanyi (1967) lewat tulisannya berjudul "*Tacit Dimension*". *Tacit knowledge* merujuk pada pengetahuan yang sangat sulit untuk diungkapkan, namun membantu mengarahkan orang dalam perilakunya. Polanyi (1967) menyebutkan "*we know more than we can tell*". Ini mengindikasikan ada dimensi lain dari pengetahuan itu yang sulit untuk diartikulasikan secara verbal. *Explicit knowledge* menurut Nonaka dan Takeuchi mengacu pada pengetahuan yang dapat ditransfer atau dipindahkan kepada orang lain. Pengetahuan semacam itu dapat diperoleh melalui buku-buku, *database*, brosur dan sejenisnya. Dengan kata lain, *explicit knowledge* merupakan *codified knowledge*. Teori pembentukan pengetahuan menurut Nonaka dan Takeuchi, masing-masing mode dapat membentuk pengetahuan sendiri-sendiri, dan bisa juga melalui interaksi antara mode-mode yang ada.

Dengan memakai framework seperti dikemukakan Nonaka dan Takeuchi, bisa dilihat bekerjanya sistem kapitalisme dalam bentuknya seperti sekarang ini (imperialisme baru) tidak menolak secara tegas sistem kapitalisme tapi juga tidak membuka diri lebar-lebar pada penetrasi kapitalisme internasional. Sekelompok

¹⁶ Ikujiro Nonaka, and Takeuchi, Hirotaka (1995). *The Knowledge- Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford: Oxford University Press.

akademisi menyebut sistem ini sebagai *kapitalisme negara (state capitalism)*. Dalam sistem ini, pembangunan ekonomi nasional dibimbing, dikawal dan difasilitasi oleh negara untuk menghindari gelombang persaingan bebas. Korea Selatan di masa kediktatoran militer, Taiwan di masa kediktatoran Chiang Kai Shek, dan adalah prototipe pembangunan ekonomi yang berwatak nasionalistik.

Sistem kapitalisme-neoliberal sebagai sistem yang dipandang sebagai batu penghalang kemajuan ekonomi nasional. Rigiditas ekonomi yang merupakan konsekuensi dari nasionalisme ekonomi ini, dianggap sebagai penyebab utama krisis ekonomi yang melanda perekonomian Asia Timur dan Tenggara. Intervensi aktif negara dalam sektor ekonomi menjadi penyebab utama munculnya nerbagai bentuk kebengkrutan ekonomi dan politik.

Proses sejarah dan dominasi itu pada dasarnya dapat dibagi kedalam tiga periode formasi social. Fase pertama adalah periode kolonialisme, yakni fase perkembangan kapitalisme di Eropa yang mengharuskan ekspansi secara fisik untuk memastikan perolehan bahan baku mentah. Berakhirnya kolonialisme telah memasukkan dunia pada era neo kolonialisme. Era Neo Kolonialisme inilah yang kemudian mengantarkan pada Fase kedua, ketika modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik dan secara langsung, melainkan melalui penjajahan teori dan ideology. Fase kedua ini dikenal sebagai era pembangunan atau era *developmentalisme*. Periode ini ditandai dengan masa kemerdekaan Negara Dunia Ketiga secara fisik. Tetapi pada era *developmentalisme* ini dominasi Negara-negara bekas penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap dipertahankan melalui control terhadap teori dan proses perubahan social mereka.

Sebuah Problema

Secara epistemologi kapitalisme Dunia Ketiga sebagai teori memiliki kelemahan. Penelitian ini coba menunjukkan kelemahan-kelemahan teori yang diproduksi Dunia Pertama saat diimplementasi

di Dunia Ketiga. Dasar pemikirannya adalah kelemahan dalam sebuah teori memiliki implikasi teoretis dan bias atas argumentasi yang dikemukakan dan penjelasan menjadi tidak valid. Karena itu, penelitian ini dimulai dengan melihat dasar pemikiran (gagasan atau pokok pikiran) dari sebuah teori kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis atas teori itu yang diukur melalui metode penelusuran dan pengkajian secara mendalam sejarah teori (genealogi teori/pengetahuan), kritik atas teori dan relevansi teori dengan perkembangan sosial politik yang ada. Dengan metode tersebut pada akhirnya dapat dinilai apakah teori yang dikritisi itu memiliki koherensi dan relevansi dengan permasalahan yang ada, dan sampai sejauh mana teori itu bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat yang ada.

Studi ini mencoba mengeksplorasi sistem kapitalisme sebagai sebuah sistem pengetahuan, terutama berkaitan dengan penempatannya sebagai model dalam replikasi kebijakan transportasi publik. Karena beroperasinya sistem kapitalisme di negara-negara Dunia Ketiga tak terlepas dari pengaruh peranan intelektual dan uiversitas. Universitas seringkali menjadi tempat untuk pengembangan pengetahuan-pengetahuan baru untuk kepentingan legitimasi rejim yang berkuasa atau kepentingan state. Dengan demikian, seperti dikatakan Philpott, daripada menguji kesesuaian gagasan tertentu dengan realitas empiris Indonesia, ia lebih tertarik untuk mengangkat isu-isu epistemologis dan ontologis yaitu cara pengetahuan diperoleh, relasi kekuasaan di baliknya, dan keberadaan pengetahuan itu sendiri-yang berdasarkan pengetahuan itu Indonesia diimajinasikan, dan dikonstruksi.¹⁷

Bagaimana proses produksi dan indegenisasi teori kapitalisme dalam kebijakan transportasi publik di Dunia Ketiga, merupakan bahasan yang akan mengungkapkan perkembangan dialektik kapitalisme sebagai sebuah Sistem Dunia, yang kemudian mendapat kritik dari teoretisi pasca modernisme, khususnya

¹⁷ Lihat lebih lanjut Simon Philpott. (2000). *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarian and Identity*, Australia: MacMillan Press.

Foucault, dan bagaimana teori-teori kapitalisme yang ada di Dunia Ketiga menjelaskan ekspansi kapitalismenya dalam bentuk produksi pengetahuan kapitalisme itu, dan bagaimana pengaruh interaktif dari neokolonisasi, modernisasi dan ketergantungan dan juga globalisasi (neoliberalisme) di Dunia Ketiga dalam produksi kebijakan.

Bagaimana proses produksi dan konstruksi dalam transformasi pengetahuan Kapitalisme dan perluasan teori-teori Kapitalisme Dunia Ketiga dalam proses pembauatan kebijakan publik khususnya dalam bidang transportasi publik kasus Bus Rapid Transit? Bagaimana teori-teori Kapitalisme Dunia Pertama direplikasi dan direproduksi dan dilegitimasi oleh universitas dan ilmuwan-ilmuwan sosial Dunia Ketiga? Bagaimana rumusan atas kelemahan dan kelebihan teori-teori kapitalisme yang ada di dalam menjelaskan hubungan interaktif antara produsen pengetahuan kapitalis di Dunia Pertama dan Dunia Ketiga? Teori alternatif kapitalisme apa yang memiliki kontribusi pada perumusan kebijakan publik di bidang transportasi publik/BRT. Dalam hal ini, karakteristik teori kapitalisme tersebut seperti apa? Sampai sejauh mana proses ideologisasi pengetahuan pada kasus penerapan kebijakan BRT yang telah terjadi di negara-negara nonBarat/nonEropa, khususnya Indonesia? Karena pada dasarnya pengetahuan tentang BRT itu ditransmisikan melalui *mode of production* sistem kapitalisme.

BAB II

Kapitalisme dalam Berbagai Perspektif

2.1 Pengantar

Bagian ini mengkritisi kegagalan implementasi kapitalisme sebagai replika dari model kapitalisme Dunia Pertama, dan juga hendak menunjukkan pergulatan teoretik dari upaya-upaya ilmuwan sosial melalui kerja-kerja akademisnya lewat kegiatan penelitian dan pembacaan kritis replika kapitalisme itu di Dunia Ketiga telah memunculkan serentetan konsep dan teori, dan kritik pun mengalir hingga menjadi diskursus tersendiri. Terbentuknya Dunia Ketiga dan kemiskinan di dalam pelapisan sosialnya yang timpang merupakan hasil langsung akumulasi dan ekspansi terus-menerus usaha kapitalis yang tidak peduli pada apapun selain laba. Kemudian, terjadi pemusatan kemakmuran secara geografis, antara bumi belahan Utara dan Selatan, Timur dan Barat. Dalam bahasa Marxian kontemporer, dunia yang sepenuhnya sudah dirambah kapitalisme sejak abad-abad penjajahan terpilah antara pusat, semiperiperi, dan peripheri atau metropolitan, satelit, dan semisatelit.

Landasan epistemologi Foucault terletak pada cara pelacakannya terhadap kekuasaan yang dipandang produktif. Ia memproduksi pengetahuan, sebuah hal yang sangat menunjukkan tradisi Saussurian dalam teks Foucault, karena pengetahuan dikaitkan dengan sistem tanda, regularitas diskursif, *enunciation* dan seterusnya. Tidak hanya kuasa memproduksi pengetahuan, secara reversibel, pengetahuan juga produktif terhadap kuasa. Pengetahuan tidak menambah kekuasaan, justru pengetahuan "memproduksi" kekuasaan. Kelindan antara kuasa dan pengetahuan ini sering disalahpahami ilmuwan alam (*natural scientists*) sebagai plagiasi atas ide Thomas Kuhn sebagai ilmu

normal (*normal sciences*) dengan ilmu kritis (*critical sciences*).

Foucault dari awal ingin meniadakan subyek, dan tidak ada sesuatu yang obyektif, karena segala sesuatu subyektif, segala sesuatu memiliki ruang cipta (sadar atau tidak) pada saat pengetahuan itu disusun. Pengetahuan muncul sebagai sesuatu yang bersifat subyektif dalam kedudukannya atau fungsinya mencampakkan gejala yang tidak disadari. Foucault menegaskan bahwa pengetahuan selalu bersifat politis, tetapi bukan karena mempunyai konsekuensi politik atau digunakan demi kepentingan politik, melainkan karena pengetahuan dimungkinkan karena adanya relasi-relasi kuasa. Kuasa itu tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi. Kuasa tidak dapat dilokalisasi, karena ia bekerja lewat aturan dan susunan tertentu.

Dengan demikian kuasa tidak bersifat negatif, refresif dan subyektif, justru kuasa memiliki ciri positif dan produktif. Kuasa memproduksi realitas dan juga ritus-ritus kebenaran. Kapitalisme sebagai sistem dunia yang bermula pada awal abad ke-16, ketika orang-orang Eropa berhamburan keluar dari sudut kecil dunia untuk menaklukkan, merampas, dan berdagang, semakin menunjukkan kejayaannya terutama sejak runtuhnya tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin. Hal itu ditengarai sebagai kemenangan bagi kapitalisme liberal dan runtuhnya komunisme. Pernyataan Marx yang mengatakan sosialisme dan komunisme akan menggantikan kapitalisme ternyata tidak terbukti.

Foucault mempertimbangkan semua pengetahuan sebagai arbiter, termasuk penyebutan kebenaran, untuk mempertahankan hubungan dan fungsi struktur kekuasaan.¹⁸ Foucault berhasil menunjukkan bahwa kebenaran merupakan konstruksi wacana yang dibingkai oleh sistem pemikiran (episteme) tertentu dan dikendalikan oleh kekuasaan. Ini dikemukakan panjang lebar

18 Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings 1972-1977*. Colin Gordon (ed.), (1980). New York: Pantheon Books.

dalam buku *Arkeologi Pengetahuan* dan dipraktikkan hampir dalam semua bukunya, di antaranya *Seks dan Kekuasaan* dan *Disiplin dan Hukuman*. Berawal dari sini Foucault merumuskan dalil bahwa kebenaran, wacana, pengetahuan (episteme), dan kekuasaan berjaln berkelindan atau senantiasa berhubungan secara tak terpisahkan. Foucault pun mendedah lebih lanjut persekutuan wacana, pengetahuan, dan kekuasaan dalam membentuk atau menciptakan kebenaran. pendekatan Arkeologi Pengetahuan menitikberatkan pada studi dan analisis pernyataan. Sedangkan peristiwa faktual historis ditempatkan sebagai pembanding terhadap pernyataan yang muncul, apakah sesuai atau tidak.

Menurut Foucault, setiap pernyataan yang sudah berbentuk arsip merupakan fenomena otonom yang didalamnya sudah terkandung realitas sosial pada saat arsip itu dilahirkan. Jadi, sebagai sebuah model analisa sejarah, arkeologi pengetahuan menghargai setiap pemikiran yang lahir dalam setiap fase sejarah. Model ini tidak hanya melihat sebuah periode sejarah sebagai bagian dari keseluruhan masa, tapi periode sejarah sebagai kesatuan dari pemikiran-pemikiran yang lahir beserta seluruh dinamika yang terjadi dalam fase itu. Foucault, menyebut bahwa kebenaran itu didefinisikan oleh pengetahuan/kekuasaan. Kebenaran tentang apapun, misal penjara, rumah sakit, atau kegilaan, selalu didefinisikan oleh kekuasaan. Dalam hal ini Foucault mencapai kemajuan dibanding para pendahulunya. Karena para pemikir sebelumnya memfokuskan analisis untuk menjawab pertanyaan: bagaimanakah kebenaran ditampilkan atau diperlihatkan kepada manusia oleh pengetahuan, sedangkan Foucault memusatkan perhatian pada permasalahan, yaitu: Bagaimanakah sesuatu dibentuk dalam wacana sehingga diakui sebagai kebenaran?. Dalam hal ini Foucault bergumul dengan persoalan proses pembentukan wacana mengenai sesuatu (misalnya, penjara, rumah sakit, seks, disiplin, dan kegilaan) yang pada gilirannya dianggap dan diakui sebagai kebenaran.

Hal ini berimplikasi pada dua hal, yaitu: pertama, Foucault menafikan dan membenamkan representasionalisme dan deskriptifisme yang tak lain adalah positivisme yang menyangga modernisme secara kukuh. Kedua, Foucault memenangkan konstruktivisme dan transformatifisme yang menjadi salah satu pilar pascamodernisme. Karena itu, seluruh proyek intelektual Foucault terpusat pada tiga hal, yaitu: (1) pembongkaran relasi antara wacana, pengetahuan, dan kekuasaan yang telah membentuk suatu kebenaran; (2) penguraian operasi atau kerja pengetahuan dan kekuasaan dalam pelbagai praktik dan wacana-wacana sejarah, hukum, sosial, dan sebagainya; (3) proses-proses pembentukan wacana yang diakui sebagai kebenaran.

Dalam pandangan Foucault, kekuasaan bukan sebagai kemampuan subjektif untuk mempengaruhi orang lain sebagaimana yang dikatakan oleh para pengikut Weber. Kekuasaan juga bukan seperti yang dikatakan oleh kaum Marxis bahwa kekuasaan sebagai artefak material yang bisa dikuasai dan digunakan oleh kelas tertentu untuk mendominasi dan menindas kelas lain, atau sebagai institusi, struktur dan kekuatan menundukkan. Kekuasaan adalah label nominal bagi relasi strategis yang kompleks dalam masyarakat. Dalam relasi kekuasaan ada yang di atas dan ada yang di bawah, ada yang di pusat dan ada yang di pinggir, ada di dalam dan ada yang di luar. Tetapi hal itu tidak berarti kekuasaan semata-mata terletak di atas, di pusat, atau di tepi. Sebaliknya, kekuasaan menyebar, terpecah dan hadir di mana-mana ibarat jaring yang menjerat kita semua.

Peran kekuasaan bagi pengetahuan ini tidak berarti negatif dan represif. Singkatnya, kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Karena menurutnya kekuasaan selalu menciptakan pengetahuan/ kebenarannya sendiri sebagaimana pengetahuan juga menyokong kebenaran. Pandangan Foucault ini sekaligus menjadi diferensiasi dengan para filosof Pencerahan, tak terkecuali teori Kritik yang masih memisahkan antara kebenaran dan ideologi, antara pengetahuan dan kekuasaan. Dalam pandangan Foucault,

kebenaran tidak terletak di luar, tapi di dalam kuasa. Kebenaran tidak lain adalah relasi kuasa itu sendiri.¹⁹

Studi ini tidak bermaksud mempertanyakan tentang apakah pengetahuan yang ditulis oleh ilmuan-ilmuan sosial tentang kapitalisme di Dunia Ketiga umumnya benar-benar menggambarkan realitas yang ada, dengan cara mengujinya di lapangan secara empiris. Tetapi, lebih mempersoalkan pada relasi pengetahuan kapitalisme itu sendiri. Artinya, tidak atau kurang relevan mempertanyakan data-data lapangan, yang lebih menarik bagi penulis adalah mempersoalkan apa yang diterima atau ditolak sebagai pengetahuan kapitalisme (*knowledge*) dan bagaimana mekanisme operasionalnya di Dunia Ketiga umumnya dan di Indonesia khususnya saat diimplementasi sebagai kebijakan publik.

2.2 Isu-isu Kritis dalam Kapitalisme, Imperialisme dan Globalisasi

Problema ideologi kapitalisme yang dibungkus dalam konsep pembangunan terus melahirkan masalah-masalah baru, dan analisis kritis tak luput peranan sejarah kolonialisme Dunia Pertama, yang membentang sebagai wacana yang telah melahirkan sikap pro dan kontra di antara ilmuan-ilmuan sosial. James Petras melihat pergolakan massa melawan neoliberalisme atau kapitalisme atau globalisasi di Amerika Latin, sedangkan Foucault maupun Tim Dant masing-masing dengan pendirian kritisnya menganalisis persoalan kapitalisme, modernisasi sebagai persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari peranan intelektual yang turut memproduksi dan melanggengkan kapitalisme tersebut.²⁰ Kapitalisme sebagaimana diyakini Berger sebagai ideologi yang memenangkan pertarungan menghadapi komunisme/ sosialisme. Pasca Perang Dunia II, analisis keilmuan tidak hanya menguak tentang produk-produk teori

19 Lihat Foucault. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Colin Gordon (ed.). New York: Pantheon Books.

20 Ankie Hoogvenlt. (1997), *Globalisation and the Postcolonial World, the New Political Economy of Development*, MacMillan Press, London, khususnya Bab 3 dan Bab 8.

yang lahir dalam masa Perang Dingin, melainkan juga melahirkan berbagai perspektif kritis yang mengungkap kelemahan-kelemahan epistemologi kapitalisme.

Isu-isu kritis menyelimuti teori-teori kapitalisme, imperialisme dan juga globalisasi. Isu-isu tersebut kecenderungannya mempersoalkan sifat universal kapitalisme yang dapat berfungsi sebagai penuntun (ideologi) yang memberikan pencerahan dalam membangun harkat dan martabat umat manusia di dunia manapun dan kapanpun. Artinya, kapitalisme mengatasi persoalan historis, tempat atau ruang dan waktu. Pencecaran terhadap universalitas kapitalisme terus menjadi diskursus para intelektual ilmu-ilmu sosial yang benar-benar menyangsikan kebenaran pengetahuan tersebut. Hingga mencapai suatu titik, kepalsuan dan kebohongan kapitalisme terungkap dalam pemikiran Foucault maupun teoretisi pascakolonial yang terus mencoba membongkar validitas pengetahuan kapitalisme itu.

Apapun bentuk-bentuk kebenaran yang sudah dibangun berdasar perkembangan peradaban Barat, kapitalisme ternyata tidak pernah berhenti menjadi pengetahuan berdimensi tunggal, karena dalam kapitalisme ada ideologi tersembunyi lain, yaitu imperialisme. Imperialisme yang tersebar di Dunia Ketiga, tidak dengan sendirinya ada karena proses kontinuitas power kapital saja, melainkan imperialisme juga dibentuk melalui logika positivis yang terus berputar tanpa mengenal titik jenuh akumulasi kebutuhan dan produksi. Imperialisme, neo-kolonialisme dapat dilacak pada teori pembangunan dan ketergantungan serta teori yang mengkritik pembangunan. Isu-isu dalam kerangka Teori Pembangunan dan ketergantungan dalam Dunia Ketiga sulit untuk menghindar dari anotasi pembangunanisme Barat. Akar ketimpangan dan ketidakadilan politik pembangunan tersebut melahirkan anakronisme globalisasi.

Hernando de Soto sangat tertarik dengan persoalan kapitalisme, kemudian dia mempersoalkannya dengan mengajukan pertanyaan mengapa kapitalisme menang di negara Barat dan gagal di manapun

juga, negara-negara non Barat? Hal ini kemudian dituangkan dalam karya *Mystery of Capital*.²¹ Menurut de Soto, persoalan utama adalah menemukan mengapa sektor masyarakat pada masa lalu, yang tidak diragukan lagi adalah kapitalisme, seharusnya kapitalisme tidak mampu memperluas dan menaklukkan masyarakat secara keseluruhan? Perkembangan signifikan formasi kapital hanya pada sektor tertentu, dan tidak pada keseluruhan ekonomi pasar. Artinya adalah kapitalisme tidak membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan manusia, tetapi hanya pada sektor tertentu yang memang memiliki dan menguasai kapital.²²

Relasi kuasa yang menciptakan kerangka dominasi-subordinasi, menjadi satu cara yang khas dan paling tidak sumir untuk menjelaskan fenomena metropolis-satelit yang tidak setara. Karenanya, perspektif struktural yang diutarakan para teoretisi terkemuka dependensia tetap relevan untuk merumuskan akar

21 Hernando de Soto, (2000). *The Mystery of Capital*. The Institute for Liberty and Democracy (ILD), Peru.

22 Meski fokus dalam studi ini adalah menyingkap proses produksi pengetahuan kapitalisme di Dunia Ketiga umumnya dan di Indonesia khususnya, yang berarti mempersoalkan hubungan antara negara dan pasar (kapitalisme), dan tanpa bisa dielakkan menghantarkan penulis untuk membincangkan tentang persoalan bagaimana dua mode organisasi sosial yang saling terkait dengan organisasi masyarakat pada skala besar. Masyarakat (*society*) tentunya sebagai konsep yang luas dan ambigu. Di sini penulis menggunakan dalam dua arti. Pertama mengacu pada kelompok-kelompok sosial yang menjadi aktor yang berhubungan dengan pembentukan negara dan pasar dalam kondisi khusus, seperti peranan kelas pekerja dalam memobilisasi untuk tujuan perluasan negara kesejahteraan. Bagaimanapun, penulis juga menggunakan konsep *society* untuk merujukannya dengan pola interaksi sosial yang terjadi di luar bidang administrasi negara dan hirarki korporasi, dan hubungan pertukaran pasar, ini lebih bermakna sebagai Polanyian tentang kehidupan asosiasional masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dituntut oleh kecenderungan yang berkembang saat ini dalam sosiologi ekonomi yang berfokus pada basis sosial dalam aktivitas pasar dan dalam sosiologi politik menuju analisis *state-in-society*.

masalah kemanusiaan yang rawan pembusukan, sekaligus mencari terapi penyelesaian.

Sejak pertengahan tahun 1960-an, teori pembangunan atau teori modernisasi atau teori ketergantungan dan lainnya yang berganti-ganti konsep dan variabel Teori itu pada dasarnya sama, yang membedakan adanya pendalaman pembahasan teoretiknya. Teori-teori modernisasi, pembangunan dsb, hanya secara implisit membenarkan masalah internal suatu negara sebagai faktor yang menyebabkan kegagalan pembangunan. Sedikit teori yang mengkritik beroperasinya kapitalisme, atau sedikit teori yang menguak kelemahan dari sistem kapitalisme. Kritik terhadap teori-teori itu masih juga dilakukan oleh intelektual Dunia Pertama dan bekerja di Dunia Pertama, jadi masih ada bias Barat. Teori modernisasi, developmentalis, dan lainnya semuanya menjelaskan kegagalan praktik kapitalisme.

Pada tahap pertama muncul Teori Modernisasi yang berada dalam kerangka Teori Evolusi. Teori ini muncul di Amerika Serikat yang diaplikasikan dalam Program Marshal Plan. Karena ada ketidakpuasan terhadap pola pembangunan ini, kemudian lahir Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) yang memiliki sisi pandang dari negara-negara dunia ketiga yang berada dalam posisi tergantung terhadap negara-negara maju. Terakhir, untuk cara pandang yang lebih sempurna, lahir Teori Sistem Dunia (*The World System Theory*), dimana dunia dipandang sebagai sebuah sistem yang sangat kuat yang mencakup seluruh negara di dunia, yaitu sistem kapitalisme. Analisis terfokus pada konsep sistem kapitalisme negara seperti diaplikasikan oleh para pendukungnya di Dunia Ketiga dan kemajuan negara-negara kapitalis juga negara sosialis. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan perubahan yang terjadi dalam sifat dan peranan negara pada masyarakat sekarang, terutama intervensi negara dan regulasi dalam ekonomi.

Proses akumulasi kapital dan perkembangan kapitalisme, menurut Amin, merupakan proses tunggal berskala dunia. Artinya, saat ini dunia berada dalam cengkraman formasi sosial kapitalisme.

Tetapi seperti halnya formasi-formasi sosial sebelumnya yang terpilah antara pusat dan pinggiran, formasi sosial kapitalisme pun bertampilan serupa. Kapitalisme beranjak dari asalnya di Eropa Barat sejak abad ke-17 ke mana pun laba bisa diambil maka akan diambil. Di mana pun langkah kapitalisme dipijakkan, di sana pula kapitalisme berkembang biak menjadi ragam produksi pokok. Ketika kapitalisme merambah Asia dan Afrika dan lebur beradaptasi dengan ragam sosio kultural setempat, kapitalisme lahir dan dinamakan kapitalisme-pinggiran.

Menurut Samir Amin, teoritis Marxis, perkembangan ragam produksi kapitalisme tidaklah sama antara di pusat dan pinggiran. Akumulasi kapital dan perkembangan kapitalisme di pusat merupakan suatu proses yang utuh-menyatu. Sektor pertanian berkembang selaras dengan sektor industri dan kedua-duanya saling melengkapi. Kapitalisme di pusat dibangun dinamikanya sendiri atau berkembang dari dalam. Sebaliknya, akumulasi kapital dan perkembangan kapitalisme di pinggiran merupakan hasil proses ketergantungan terhadap pusatnya. Oleh karena itu, kapitalisme di pinggiran berbeda dengan kapitalisme di pusat. Perkembangan di pinggiran dicirikan tidak selarasnya hubungan antarsektor karena kapitalisme di pinggiran hanya melayani perkembangan kapitalisme di pusat. Kapitalisme di pinggiran terutama menghasilkan bahan baku dan beberapa barang dagangan bukan alat-alat produksi utama. Kapitalisme pinggiran hanya menjadi kaki tangan kapitalisme pusat.²³

Perkembangan kapitalisme di pinggiran disebut Amin dengan perkembangan tak-imbang. Artinya, satu sektor ekonomi mengalami perkembangan lebih baik di banding sektor lain. Sektor yang berkembang maju menjadi betul-betul kapitalistik karena ditopang kapital dari luar (tentu saja lewat penanaman modal asing dan utang luar negeri dari kompeni keuangan internasional semacam IMF, ADB, atau Bank Dunia). Sedangkan sektor

23 Samir Amin. (1976), *Unequal Development*. New York: Monthly Review Press.

terbelakang, seperti pertanian pangan dan industri kecil-kecilan, umumnya adalah sektor-sektor yang masih terperangkap sisa-sisa hubungan produksi pra-kapitalis yang di sana kapitalisme belum betul-betul merasuk. Fungsi keberadaan sektor-sektor pinggiran seperti industri pengolahan pangan kecil-kecilan, pertanian pangan, dan perdagangan kecil-kecil adalah untuk menyediakan kebutuhan reproduksi kelas pekerja murah. Akhirnya, menurut Amin, perkembangan kapitalisme di pusat formasi sosialnya menghantar pada keterbelakangan pinggirannya.

Joseph E. Stiglitz dalam *Globalization and Its Discontent* (2002) menjabarkan bahwa globalisasi memberi dampak yang ambigu untuk kasus negara-negara berkembang, terutama kawasan Asia. Secara kontras, globalisasi membawa angin surga bagi pertumbuhan perekonomian namun disisi lain, globalisasi tidak lebih merupakan rejim kolonial baru yang mengontrol dan mengarahkan pemulihan perekonomian dan tata sosial lainnya. Lembaga keuangan dunia, seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank melakukan manajemen penyehatan ekonomi secara tidak adil. Lembaga-lembaga keuangan dunia praktis menjadi kaki ideologi kapitalisme untuk menundukan ideologi-ideologi di luar jangkauan otoritas politik Gedung Putih. Pesan penting Stiglitz yang harus diwaspadai adalah sinyaleman bahwa globalisasi mengidap sisi gelap bagi keberlangsungan narasi peradaban manusia yang beradab dan demokratis.²⁴

Ilmuwan-ilmuwan sosial (politik, sosiologi, dan ekonomi) gagal menjelaskan dan menunjukkan krisis dalam kapitalisme, baik di negara Dunia Ketiga maupun negara-negara maju yang secara kualitatif mengambil bentuk baru, yang secara khusus modal swasta disubordinasi negara, dan operasi pasar dikontrol melalui perencanaan nasional. Karena itu, negara mempunyai unsur intrinsik dalam hubungan produksi kapitalis, dan konsep kapitalisme negara dengan atribut-atribut kepemilikan baru dalam

24 Joseph E. Stiglitz. (2002). *Globalization and Its Discontent*. NY: W.W. Norton & Company Inc.

BAB III

Varian Teori Kapitalisme Dunia Ketiga dan Kelemahannya

3.1 Pengantar

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh teoretisi ilmu sosial untuk mengembangkan perangkat yang bisa menjembatani kesenjangan dan kekosongan alat analisis untuk mengembangkan, dan mengimplementasikan serta memproduksi reproduksi kebijakan negara semiperiferi dalam struktur historis kapitalis pusat ke negara periferi di Asia.³⁷ Penelitian ini pada dasarnya mengeksplorasi pengetahuan kapitalisme yang ditempatkan sebagai teori produk Dunia Pertama.

Penyebaran pengetahuan kapitalisme yang melampaui batas-batas geografis, melewati ruang dan waktu bukan pengetahuan yang bebas nilai. Meski telah banyak alat uji untuk mengukur kesahihan kapitalisme melalui metode positivis sebagai teori yang universal, tetapi kapitalisme masih menyisakan keraguan atas sifat universalnya. Dalam proses perkembangan sejarahnya, sampai kini pengetahuan itu sudah melebar menjadi kapitalisme internasional.

Kapitalisme Internasional dan teori Kapitalisme Negara di Dunia Ketiga berdasar kritik terhadap teori Kapitalisme secara

³⁷ Konsep kapitalis pinggiran dalam hal ini untuk menyebut tipe kapitalisme yang ada di kawasan Dunia Ketiga khususnya Asia Timur (minus Jepang), dan Amerika Latin, karena dunia ini dengan sengaja dibagi secara dikotomis oleh ilmuwan-ilmuwan sosial Barat untuk memudahkan penetrasinya di negara lain. Tetapi dalam konsepsi Wallerstein dapat diinterpretasi adanya sistematis kapitalisme terdiri dari tiga lapisan, yaitu: core, semiperiferi dan periferi dimana semiperiferi countries menjadi penyangga core, dan periferi menjadi penyangga semiperiferi. Indonesia dapat ditempatkan sebagai negara periphery menurut kategori ini.

umum. Kritik itu menjadi titik tolak untuk eksplorasi teori lebih lanjut atas relevansinya dengan perkembangan fenomena mutakhir saat ini, atau tepatnya dalam era pasca Perang Dingin. Persoalan muncul tidak hanya terkait dengan produksi atau ekspansi kapitalisme di tingkat antarnegara atau kawasan tetapi sudah masuk ke tingkatan lokal, dan nasional. Kapitalisme bahkan diklaim telah menjadi pandangan hidup universal seluruh bangsa manusia. Pendekatan lain seringkali dianggap telah menemui jalan buntu dan akhir sejarahnya.

Gambaran secara umum proses transformasi kapitalisme pada era pasca Perang Dingin tidak lagi mendudukan ideologi politik sebagai basis untuk melakukan ekspansi untuk mencari pengaruh kekuasaan ke negara-negara lain, yang notabene adalah negara-negara bekas koloni dari core capitalist yang berada di benua Asia dan Afrika serta Amerika Latin, tetapi ekspansi itu berganti ideologi dengan menempatkan kapitalis sebagai ideologi tandingan untuk mengakhiri perang ideologi politik. Proses transformasi ideologi menjadi menimbulkan berbagai interpretasi yang berakhir pada sikap pro kontra atas ideologi kapitalisme itu.

Berbagai alat analisis mulai dibangun sebagai alat untuk menilai atau mengkritisi kapitalisme, dan kritik-kritik itu tak terlepas dari peranan universitas umumnya dan intelektual atau ilmuwan sosial khususnya. Transformasi tentang penetrasi ideologi kapitalisme bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan nonteknis. Karena di balik proses transformasi dan penetrasi tidak hanya menyangkut transformasi teknologi inovasi, dan rasionalisasi struktur, melainkan terkait dengan serangkaian proses perekayasaan Ilmu Sosial untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang diperlukan untuk menghasilkan dan melegitimasi pengetahuan untuk didedikasikan kepada kapitalisme internasional atau kapitalisme dunia yang sejatinya adalah rekonstruksi peranan dan relasi kuasa antaraktor-aktor ekonomi politik di Dunia Pertama dan Dunia Ketiga.

Ciri kapitalisme yang paling menonjol adalah anarki kekuatan produktif. Ini tetap benar walaupun ada dominasi monopoli-

monopoli besar, intervensi IMF dan Bank Sentral dan fenomena globalisasi yang banyak disebut. Heilbroner (1991) secara dinamis menyebut kapitalisme sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik. Logika formasi sosial yang dimaksud mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat.³⁸

3.2 Kapitalisme Model Asia Timur

Negara-negara Dunia Ketiga, tepatnya negara-negara di Asia, seperti Jepang, Korea, Tiongkok, dan beberapa negara yang pada tahun 1980-an menjadi macam Asia (NICs/New Industrialized Countries) sebagai sebutan negara yang berhasil menjadi negara industri kapitalis baru karena pesatnya perkembangan sektor industri, dan dikenal karena keberhasilannya menngawinkan nilai-nilai kapitalisme dengan kultur setempat.³⁹ Jepang sejak tahun 1970-an adalah negara maju Asia. Masyarakat dan wirausahanya menikmati kelimpahan materi melalui industrialisasi dengan wujud interelasi harmonis dalam hubungan antarmanusia, antara manusia dan alamnya.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan manusianya, perusahaan Jepang sejak 1980-an dituntut mengerjakan restrukturisasi positif dan kreatif, dalam arti perusahaan harus menghasilkan produk dan jasa yang didasarkan pada dua tema. *Pertama*, jiwa manusia yang berarti respek pada

38 Istilah formasi sosial yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini juga dipakai oleh Jurgen Habermas, melalui karyanya *Legitimation Crisis* (1988), Habermas menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial (primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme). Pertama, pandangannya tentang peranan semi-periferi dipatahkan oleh pemikiran fungsionalis atau teologis.

39 Periksa kembali tesis Peter Berger tentang perkembangan kapitalisme di Asia Timur maupun tesis Kunio tentang kapitalisme Asia Tenggara yang disebutkan sebagai replika (tiruan) kapitalisme negara asalnya (Dunia Pertama).

individualitas dan kreativitas manusia. *Kedua*, suatu jiwa melaju, yaitu suatu kesadaran inovatif dan yang menantang, yang justru menumbuhkan inisiatif kecil dan menengah tanpa membunuh yang besar dan sebaliknya. Tiongkok tampil dengan sistem ekonomi pasar sosialis setelah mengalami perubahan sejak 1978, dengan kebijakan *gaige kaifang* (*opening up and reform*) dan *chengbaozhi* (*self responsibility*) masyarakat. Reformasi sistem ekonomi yang gradual dan konsisten, terus melaju dengan terbentuknya suatu kelas wirausahawan baru yang kebanyakan bermukim di kawasan Pantai Timur Tiongkok. Skala bisnis mereka tergolong menengah dan kecil, baik dalam industri, perdagangan, jasa pariwisata, jasa pemanfaatan teknologi informasi dan lainnya. Langkah menciptakan suatu kerangka kerja suatu ekonomi pasar bebas di bawah kendali aturan hukum terus digerakkan. Korea Selatan, sebagai negara Asia Timur, perilaku masyarakatnya sebagai pelaku ekonomi dan pasar, dalam perkembangannya mirip Jepang. Kapitalisme yang humanistik mereka artikan sebagai sistem ekonomi pasar yang menumbuhkembangkan inisiatif kecil dan menengah tanpa membunuh yang besar dan sebaliknya.

Berdasarkan studinya di negara-negara berkembang, Haque dalam *Restructuring Development Theories and Policies* (1999) menunjukkan bahwa kapitalisme bukan saja telah gagal mengatasi krisis pembangunan, melainkan justru lebih memperburuk kondisi sosial-ekonomi di Dunia Ketiga. Arah gerak pembangunan sampai ke globalisasi dewasa ini dapat dipahami sebagai serangkaian peristiwa krisis (pembangunan). Kapitalisme di Asia Timur yang selama ini dijadikan teladan keberhasilan pembangunan dan keberhasilan kapitalisme Dunia Ketiga telah mengalami kebangkrutan. Banyak orang mulai mengamalkan bahwa era saat ini sebagai berakhirnya era developmentalisme. Suatu proses perubahan sosial pasca perang dunia kedua yang dibangun di atas landasan paham modernisasi menuju babak-babak akhir. Namun, di negara-negara pusat kapitalisme, muncul jawaban untuk mempercepat laju kapitalisme bahkan jawaban ini telah lama disiapkan, bahkan sejak krisis kapitalisme memasuki tahun 1930-

an. Jawaban itu adalah globalisasi kapitalisme. Krisis terhadap pembangunan yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan bagian dari krisis sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia yang lain, yang diperkirakan telah berusia lebih dari 500 tahun. kapitalisme sebagai sistem ekonomi kini tengah berjaya di tingkat global terutama setelah momentum hancurnya sosialisme di awal 1990-an. Hampir seluruh negara di dunia, menerapkan kapitalisme dengan berbagai variasinya. Robert Gilpin dan Jean Millis Gilpin dalam *The Challenge of Global Capitalism* (2000) bahkan memuji kapitalisme sebagai "sistem ekonomi pencipta kesejahteraan paling berhasil yang pernah dikenal di dunia."

3.3 Kapitalisme Model Asia Tenggara

Relasi negara dengan kapitalis internasional semakin kuat di bidang transportasi. Pengembangan sistem transportasi didasari kepentingan negara maju yang menguasai teknologi. Secara historis hal itu terlihat dari desakan yang kuat dari penguasa teknologi, pemilik modal, kapital kepada negara-negara berkembang umumnya atau di negara Asia khususnya. Pendistribusian dan alih-alih teknologi transportasi hingga kini dikembangkan dengan berbasis pada analisis teknis fungsional, yang menyangkut kajian ilmu teknik, lingkungan, manajemen transportasi, planologi kota dan lainnya, dan tidak memasukkan kajian sosiologis.

Kapitalisme sebagai sebuah sistem global telah mengalami krisis yang amat parah karena munculnya apa yang disebut Karl Popper sebagai masyarakat terbuka. Berpijak pada teori Karl Popper, Soros mengatakan bahwa kapitalisme saat ini telah membahayakan masyarakat terbuka dan ini awal dari kritiknya terhadap sistem kapitalisme.⁴⁰ Sistem kapitalisme, dalam pandangan Francis Fukuyama merupakan akhir dari sejarah⁴¹ yang artinya tidak

40 George Soros, dalam 'Open Society: Reforming Global Capitalism'.

41 Francis Fukuyama dalam buku *The End of History* memperlihatkan kapitalisme sebagai pemenang dalam pertarungan ideologi ekonomi politik.

ada lagi sistem yang menggantikannya.⁴² Istilah Soros disebut periphery dengan mengendalikan pertumbuhan ekonomi mereka. Dalam hal ini, Soros menyatakan bahwa International Monetary Fund (IMF) dan World Bank merupakan dua organisasi keuangan internasional yang sengaja dibentuk oleh negara-negara pusat agar tetap bisa menguasai dan mengontrol negara-negara pinggir (negara berkembang dan terbelakang). Marx dan Engels menjelaskan bahwa kapitalisme berkembang sebagai pasar dunia. Ramalan brilyan ini sekarang ditunjukkan oleh fenomena globalisasi. Namun ini tidak berarti bahwa ketimpangan kapitalisme dihapuskan, atau kenaikan atau kemerosotan terjadi secara simultan di seluruh ekonomi dunia. Kapitalisme tidak berkembang dalam waktu bersamaan dan dengan cara yang sama di semua bagian dunia. Siklus ekonomi juga tidak terjadi dengan mulus dan lancar di semua bagian ekonomi dunia.

Pada masa transaksi finansial dan ekonomi terjadi dengan kompurisasi teknologi tinggi, proses-proses ini memerlukan waktu untuk melapangkan jalannya lewat ekonomi dunia. Memakan waktu satu tahun bagi devaluasi mata uang Thai untuk mencapai Rusia. Rusia gagal membayar utangnya bulan Agustus 1998. Terjadinya devaluasi di Brazil terjadi Januari 1999, yang kemudian terjadi pula di Asia, dan efeknya lebih langsung, mendorong terjadinya kebangkrutan ekonomi yang satu menyusul yang lain, dan menimbulkan pergolakan kelas di Korea Selatan, krisis politik serius di Malaysia, dan lebih dari semua itu mulainya revolusi di Indonesia. Robison dalam karya *Indonesia: The Rise of Capital* (1986), menunjukkan dengan cermat bahwa klaim tiadanya kelas kapitalis di Indonesia tidak berlaku lagi di akhir 1970-an. Kaum kapitalis di Indonesia bukan para borjuis yang independen dari pemerintah, melainkan para pejabat negara sendiri, para perwira militer, keluarga, sanak dan teman mereka, serta para pedagang

42 Pandangan Fukuyama, seperti apa yang dikemukakan Berger bahwa kapitalisme menjadi masa depan dunia. Kemudian hal ini dibantah oleh Giddens dan James Petras dalam tulisannya akhirnya menyanggah Giddens tentang the Third World.

BAB IV

Produksi Pengetahuan Kapitalisme

4.1 Pengantar

Di dalam masa Renaisans berlaku hukum bahwa benda-benda diatur berdasarkan hubungan kesamaan. Artinya, benda yang satu diacu dengan benda yang lain. Pada abad ke-16 dan 17, benda tidak lagi dilihat pada dirinya sendiri, melainkan diubah menjadi representasi atau sistem tanda. Dalam susunan tanda ini, manusia belumlah muncul, ia masih sejajar dengan benda-benda, karena representasi manusia identik dengan representasi benda-benda. Pada abad ke-18, Kant mulai mempersoalkan batas-batas representasi. Penemuan batas-batas ini bukan suatu bentuk destruksi atas metafisika tanda-tanda, tetapi juga penemuan sang subyek penghasil representasi, yakni kesadaran diri, dan hal ini sebagai awal dari antroposentrisme Barat.

Oleh karena itu, menurut Foucault, manusia merupakan hasil perubahan susunan tanda dan benda-benda. Dengan menghapus subyek sejarah itu, ia memproklamirkan kematian manusia, karena manusia sebagai subyek kerap menimbulkan dominasi, teror, pemerasan-pemerasan. Dengan membunuh manusia sebagai subyek sejarah, ia mau mengakhiri filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern, karena dua bentuk pengetahuan ini dihasilkan dari suatu keyakinan akan adanya subyek. Konsep neo-imperialisme, hegemoni dan supremasi menjadi bagian tak terpisahkan dari wacana kritik teori Poskolonial.

Dalam perkembangan teori-teori kritik, kolonialisme merupakan idiom yang berkonotasi pejoratif. Kolonialisme dipahami sebagai bentuk eksploitasi dan peminggiran oleh kuasa politik dunia Barat terhadap keberadaan identitas kultural (*cultural*

identity) lokal yang heterogen. Yang di maksud *cultural identity* dalam konteks ini ialah identitas keagamaan, nasionalitas, etnis, ras dan jender. Wacana poskolonial memayungi kemunculan wacana-wacana tanding di kawasan-kawasan yang pernah mengalami kolonisasi negara-negara Eropa. Perspektif poskolonial menyajikan eksplorasi kritis wacana poskolonial dalam relasinya dengan isu-isu ras, nasionalitas, subjektivitas, *power*, *subalterns*. Pemetaan isu poskolonial ini menggiring wacana kritik poskolonial ke dalam pergulatan identitas kultural lokal yang bersifat politis.

Foucault menganalisis tentang demistifikasi kekuasaan. Analisisnya menetapkan bahwa kekuasaan berada dalam situasi praktik-praktik sosial dan situasi sosial yang disharmoni. Diskursus dalam formasi sosial ini dimanifestasikan dalam diskursus ekonomi. Bagi Foucault selanjutnya, kekuasaan itu secara langsung terikat kedalam diskursu ekonomi itu sendiri. Diskursus itu berada didalam struktur sosial yang membawa kekuasaan untuk keberlanjutannya dalam hubungan sosial dan memberikan kredibilitas pada ideologi yang menjalankan kekuasaan yang diciptakan melalui sarana-sarana tertentu. Diskursus juga bisa menjadi kesulitan/rintangan bagi yang mempunyai kekuasaan. Foucault juga menegaskan atau menggarisbawahi struktur kekuasaan dalam diskursus. Diskursus tidak sekalipun dan untuk semuanya pasif terhadap kekuasaan atau menimbulkan perlawanan, kekuasaan itu lebih kompleks dari yang disuarakan.

Dalam konteks ini perlu memberikan perhatian pada konsep yang kompleks dan prosa yang tidak stabil karenanya diskursus menjadi instrumen dan memiliki efek kekuasaan, tetapi juga rintangan, suatu blok ketidakpastian, suatu poin perlawanan dan starting poin bagi strategi oposisi. Diskursus mentransmisikan dan menghasilkan kekuasaan, karenanya diskursus memiliki kekuatan mamaksa, tetapi juga diskursus dapat meruntuhkan dan menyingkap, mengubah sifatnya yang rentan dan menyebabkan kemungkinan mengganggu kekuasaan. Karena itu diskursus menjadi suatu dimensi taktis tentang bagaimana hubungan kuasan

bekerja dalam institusi, kelompok dan individu, dan bagaimana diskursus secara ekonomi berjalan: nilai pengetahuan tidak lagi terletak pada nilai tukarnya, tidak lagi terletak pada benda itu sendiri yaitu uang dengan nilai nominalnya.⁴⁷

4.2 Teori Kapitalisme dan Ekspansi Kapitalisme pada Dunia Ketiga

Berakhimya Perang Dunia Pertama berarti berakhirnya era kolonialisme, itu hanya dalam pengertian kronologi waktu, bahwa kolonialisme mengalami keterputusan secara politik, tetapi tidak secara ekonomi dan budaya. Tahap perkembangan selanjutnya adalah memasuki era Perang Dingin, suatu era yang menempatkan pertentangan ideologi antara Komunis dan Kapitalis, dan negara-negara bangsa Dunia Ketiga terperangkap dan masuk dalam permainan politik hegemoni dari negara-negara yang terbelah dalam kubu Komunis dan Kapitalis, dan modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik, melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi. Dalam era ini dominasi negara-negara bekas penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap dilanggengkan melalui kontrol terhadap teori dan proses perubahan sosial. Teori kapitalisme menjadi bagian dari media dominasi, karena teori tersebut direkayasa untuk menjadi paradigma dominan untuk perubahan sosial Dunia Ketiga oleh Dunia Pertama. Dengan kata lain, pada fase kedua ini kolonialisasi tidak terjadi secara fisik, melainkan melalui hegemoni yakni dominasi cara pandang, ideologi dan diskursus dominan melalui produksi pengetahuan, hingga akhirnya kapitalisme memainkan peran penting dan masuk dalam tataran krisis.

Francis Fukuyama dalam bukunya, *The End of History and the Last Man* (1992) menyatakan bahwa proses perjalanan manusia sudah berakhir, proses dialektika pengetahuan ideologi telah mencapai pada kebenaran absolut dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal yang mengalahkan ideologi sosialisme dan fasisme. Pada akhirnya semua negara berjalan sesuai tuntunan

47 Lihat Foucault lebih lanjut.

kapitalisme. Tetapi kenyataan yang ada di Amerika Latin tidak seperti yang diramalkan Fukuyama. Beberapa negara Amerika Latin, masih terdapat aliran lain selain Kapitalisme, yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Aliran itu adalah paham Sosialis yang didukung oleh beberapa pemimpin negara di Amerika selatan. Misal saja, Evo Morales sebagai presiden Bolivia, Michelle Bachelet, seorang perempuan dari Partai Sosialis, sebagai presiden Cile, Rafael Correa, seorang intelektual kiri sebagai presiden Ekuador, tokoh revolusioner lama, Daniel Ortega sebagai presiden Nikaragua, Hugo Chavez dari Venezuela, Nestor Kirchner dari Argentina, Tabarez Vazquez dari Uruguay, serta Ignacio "Lula" da Silva dari Brazil.⁴⁸ Mereka membentuk suatu paham oposisi, dengan menjadikan aliran sosialis sebagai kritik daripada paham Kapitalistik sebagai mainstream. Adapun secara garis besar prinsip dasar dari pemahaman sosialis ini adalah lebih

48 James Petras dalam beberapa tulisannya memaparkan dengan cermat perjuangan presiden-presiden di negara Amerika Latin, seperti keyakinan Presiden Venezuela Hugo Chavez. Bagi Chavez, sosialisme abad 21 adalah varian baru sosialisme yang bersimpangan jalan dan bahkan belajar dari pengalaman sosialisme abad 20. dalam kata-kata Chavez sendiri, sosialisme abad 21 adalah "sosialisme baru yang berbeda dari sosialisme negara yang diterapkan di Uni Soviet, Eropa Timur atau Kuba hari ini, ia akan menjadi sosialisme yang berwatak pluralistik dan tidak terlalu terpusat pada negara...sosialisme yang berdasar pada prinsip solidaritas, persaudaraan, kasih sayang, keadilan, kebebasan dan persamaan hak". Tak pelak, sejak kehancuran sosialisme-komunisme di Uni Soviet dan berkobarnya kapitalisme dalam bentuk mutakhirnya yang paling biadab, kapitalisme neoliberal, sebagai ideologi pemenang tunggal peradaban, membuat seakan sosialisme adalah ideologi reaksioner yang paling ketinggalan jaman. Fenomena ini ditegaskan oleh Fukuyama melalui frasanya yang terkenal: sejarah telah berakhir, kapitalisme dan demokrasi liberal adalah sang pemenang. Bagi para pengkritiknya, sosialisme selalu diidentikkan dengan sistem politik yang totaliter, serta sistem ekonomi yang melulu di bawah kontrol dan perencanaan ketat negara.

menekankan pada kesetaraan ekonomi, serta menempatkan negara didalam peran yang cukup signifikan dibidang perekonomian pada khususnya, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Misalnya saja Evo Morales, presiden Bolivia yang dengan sangat yakin mencanangkan langkah nasionalisasi atas sumber daya alam negerinya yang selama ini dikuasai asing.

Didalam hal ini Morales meminta agar korporasi global milik Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada itu harus berperan sebagai mitra dan bukan menjadi majikan dalam mengeksploitasi kekayaan alam Bolivia, dimana apabila mereka menolak hal tersebut, maka korporasi global tersebut harus angkat kaki dari negaranya. Langkah ekstrim yang diambil Morales dan kawan-kawan ini bisa jadi menimbulkan kontroversi dimata dunia secara global, dan bukan tidak mungkin nantinya akan bermuara kepada embargo ekonomi dan lainnya yang tentu saja dapat berdampak buruk bagi masyarakat Amerika Selatan itu sendiri. Kebijakan Morales ini dapat juga disebut sebagai Kejahatan, sebab dengan Kebijakan yang terlalu menutup diri dengan negara lain, maka secara tidak langsung menghambat proses pengembangan diri dari masyarakat Amerika Latin tersebut. Bisa jadi dengan adanya embargo dari Amerika dan sekutunya itu banyak warga Amerika Selatan, terutama yang bekerja di luar negaranya itu mengalami kesulitan didalam berbagai hal. Giddens dalam Politik "Jalan Ketiga", dijelaskan tentang upayanya dalam mencari sebuah hubungan yang baru antara individu dengan masyarakat. Ia merupakan definisi ulang dari hak dan kewajiban.

Perhatian utama "Jalan Ketiga" adalah untuk mencapai keadilan sosial. Konsep jalan ketiga itu pun sebenarnya adalah kapitalisme terselubung. Konsep '*the Third Way*' dari James Petras bisa jadi lebih relevan untuk menyiuudahi ketidakrelevanan adposisi kapitalisme yang membawa kehancuran negara bangsa Amerika Latin secara ekonomi dan politik. Meski dalam era globalisasi seperti saat ini, tiadanya alternatif bagi sistem yang lain karena kuatnya cengekeraman kapitalisme maupun globalisasi yang terus-meneus

BAB V

Produksi Kapitalisme dalam Pembangunan Transportasi Publik di Dunia Ketiga dan di Indonesia

5.1 Pengantar

Kebijakan politik dan ekonomi yang berkenaan dengan proses liberalisasi disusun dengan memasukkan faktor-faktor struktural, misalnya logika kapitalisme, mobilitas modal, dan kapitalisme global-dalam menjelaskan perubahan kebijakan. Kerumitan dampak proses liberalisasi di Dunia Ketiga tidak semua terungkap dengan baik. Kebijaksanaan negara pada gilirannya harus disesuaikan dengan keperluan-keperluan serta tuntutan-tuntutan kapitalisme pinggiran.

Secara historis sistem transportasi dirancang untuk kepentingan politik-ekonomi tertentu. Sistem transportasi berkembang pesat sepesat perkembangan modernisasi Barat. Beberapa fakta yang menunjuk pada kuatnya pengaruh modernisasi pada pengembangan sistem transportasi yang dialirkan ke negara-negara Dunia Ketiga. Pengembangan transportasi sebagaimana modernisasi dalam implementasinya menjadi sebuah ideologi. Transportasi tak lain merupakan wujud lain dari ideologi kapitalisme yang dirancang untuk memberi kontribusi dalam proses akumulasi modal dan kekuasaan dalam masa seperti sekarang, globalisasi. Di dalam transportasi ada relasi kekuasaan yang rumit, melibatkan relasi antara *the power elite/the rulling elite*, massa, dan kapital atau *market*.

Di negara-negara yang dulunya dipimpin oleh rejim otoriter (seperti Indonesia, Argentina, Rusia, Korea Selatan atau Brazil), neoliberalisme masuk ketika negara-negara itu mengalami krisis politik dan krisis ekonomi. Pada masa itulah melalui sejumlah agen-

agen utamanya semisal IMF dan World Bank, agenda neoliberalisme mulai masuk dan membuat sejumlah penyesuaian struktural. Dan disambutlah sebuah jaman yang seringkali disebut-sebut dengan nada optimis yang meluap: transisi menuju demokrasi. Tetapi, sebaiknya tidak menelan mentah-mentah sebuah doktrin bahwa setelah rejim otoriter runtuh, maka demokrasi akan menjelang, kesejahteraan dan keadilan pasti akan datang. Faktanya, ada kekuasaan lain yang jauh lebih imperialistik dan menindas. Sebuah kekuasaan korporasi yang senantiasa mengincar jalan yang sedang ditempuh oleh negara-negara yang mengalami masa transisi. Jadi, di negara-negara manapun perjalanan transisi bukan berjalan secara alami, netral dan bukan tidak ada kepentingan-kepentingan modal yang mengincar setiap ruas jalannya.

Dalam membahas globalisasi neoliberal, maka Latin Amerika (LA) menjadi penting untuk diperhatikan. Selain bahwa kawasan ini begitu dekat dengan jantung kekuasaan neoliberal (Amerika Serikat), juga karena disanalah eksperimen awal terhadap beragam kebijakan neoliberal dilakukan dan menimbulkan beragam perlawanan. Sejak dua dekade negara di Latin Amerika (Amerika Selatan) menjadi laboratorium bagi neoliberalisme, satu dekade terakhirnya menghasilkan krisis.

5.2 Membangun Kapitalisme

Dalam perkembangannya, negara-negara bekas jajahan yang ada negara di Afrika dan Amerika Latin bisa memperluas proses hubungannya dengan ekonomi global, tetapi mereka terbukti dibatasi kemampuannya untuk merekonstruksi (membangun) pasar sekitar koalisi pembangunan dan hasil, sebagaimana diilustrasikan melalui penelitian dalam tradisi ketergantungan (lihat Evans, 1979, Gerrefu dan Wyman, 1990). Hubungan pertukaran yang timpang terutama dalam perdagangan komoditas dan ketergantungan sangat besar pada investasi asing menunjukkan strategi pembangunan yang sangat buruk, dimana program-program penyesuaian struktural

Produksi Kapitalisme dalam Bidang Transportasi Publik
di Dunia Ketiga dan di Indonesia

berkaitan dengan pembayaran kembali hutang luar negeri. Dampak investasi asing langsung dan ketergantungan pada modal asing untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi merupakan isu yang sangat kontroversial. Karena itu menjadi penting secara sosiologis mengeksplorasi dan memverifikasi kebenaran tesis yang berbunyi bahwa hubungan antara negaraperipheri dengan *core countries* melalui negara semiperipheri berperan sebagai penyangga sistem internasionalisasi jejaring kapitalisme melalui pengkajian dengan mengambil kasus produksi kebijakan BRT di Dunia Ketiga.

Transportasi merupakan komoditas yang memiliki kedudukan unik dan penting di Indonesia, karena tidak saja berdimensi ekonomi dan sosial, tetapi juga politik dan budaya. Begitu pentingnya permasalahan transportasi dan pembangunan transportasi publik sehingga ekonomi Dunia Ketiga (kapitalis peripheri) tergantung padanya. *Bus Rapid Transit* (BRT) memberi kesempatan signifikan pada industri transit publik untuk menambah pilihan investasi transportasi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah mobilitas pada sejumlah kawasan urban di negeri ini. Hal ini terlihat dari realitas yang memberikan gambaran pertumbuhan populasi yang kuat ditunjukkan dalam banyak pola, tingkat kemacetan yang meningkat, dan tingkat penggunaan transit. Ini merupakan gambaran dari berbagai hal serius yang menjadi bahan pertimbangan bagi perencana transportasi, berkaitan dengan upayanya untuk menambah pilihan investasi di kawasan urban.

Mengapa pengenalan BRT di Asia itu berasal dari menarik pelajaran dengan melakukan studi perbandingan di tiga kota Asia? Siapa saja aktor yang berperan dalam proses menarik pelajaran dari BRT dan apa sebenarnya peranan mereka. Faktor-faktor apa yang mendorong aktor-aktor tersebut untuk menarik pelajaran dari BRT. Aktor pertama adalah organisasi internasional memainkan peranan penting dalam menarik pelajaran yang berperan mentransfer program keberhasilan BRT di Bogota (Columbia) dan Curitiba (Brasil) untuk didiseminasi pada kota-kota negara-negara Dunia Ketiga yang menghadapi masalah di bidang transportasi publik.

Peranan Bank Dunia sebagai penyandang dana untuk membangun infrastruktur sistem BRT. Aktor kedua adalah pemerintah nasional dan pejabat pemerintah kota.

Didalam literatur teori modernisasi pertimbangan-pertimbangan mengenai negara dan masyarakat seringkali dikemukakan terpilah karenanya berbeda dan secara hakiki bertentangan dengan tradisi-tradisi teoritisnya. Sistem transportasi berkelanjutan adalah tatanan baru sistem transportasi di era globalisasi saat ini.⁷⁰ Hal itu mencerminkan adanya dinamika relasi yang intensif antara negara dan masyarakat serta kapitalisme Korporasi multinasional berkembang menjadi *finance oligarchy* yang bersiap-siap untuk melucuti demokrasi dan keadilan sosial. Bahkan, tak segan-segan, untuk menegakkan prinsip-prinsip neoliberalisme, kekerasan juga dihalalkan dan rezim otoriter pun juga didukung asalkan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi pasar dan neoliberalisme, maka tentu juga akan tetap didukung. Yang penting, akumulasi modal dan penumpukan laba jalan terus.

Paradigma pembangunan transportasi publik perkotaan merupakan suatu sistem transportasi yang humanis yang menjangkau kelompok masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah memperoleh kemanfaatan dalam kebijakan transportasi baik di perkotaan maupun perdesaan. Ini memiliki implikasi politik yang menempatkan peranan negara (pemerintah) untuk semakin memperkuat keinginan politisnya, kelembagaan dan ketepatan dalam mengambil keputusan yang mencakup unsur sosial, finansial, teknis dan politis.⁷¹

70 Lee Schipper, *Sustainable Urban Transport in the 21st Century: Challenges for the Developing World*, h. 14-16, dalam Geetam Tawari (ed.), *Urban transport for Growing Cities: High Capacity Bus Systems*, McMillan India, 2002.

71 A. Armstrong Wright, *Urban Transport: World Bank Policy*, h. 19-24, dalam Margaret Heraty (ed.), *Urban Transport in Developing Countries: Lesson in Innovation, Perspective I*, PTRC Education and Research Services Ltd, London, 1991.

Kegagalan sistem transportasi mengganggu perkembangan suatu wilayah/kota, mempengaruhi efisiensi ekonomi perkotaan, bahkan kerugian lainnya. Isu-isu ketidaksepadanan misalnya, dapat berakibat pada masalah sosial, kemiskinan (*urban/rural poverty*) dan kecemburuan sosial.⁷² Sistem transportasi merupakan elemen dasar infrastruktur yang berpengaruh pada pola pengembangan perkotaan. Pengembangan transportasi dan tata guna lahan memainkan peranan penting dalam kebijakan dan program pemerintah. Pengembangan infrastruktur dalam sektor transportasi pada akhirnya menimbulkan biaya tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam pembenahan atau restrukturisasi sektor transportasi menjadi hal yang mendesak.

Mempertimbangkan kondisi makro yang ada terutama pengaruh iklim globalisasi menempatkan persoalan transportasi menjadi layanan kebutuhan atau aksesibilitas yang harus disediakan oleh Negara. Aksesibilitas transportasi menjadi penting seiring dengan meningkatnya peradaban umat manusia. Secara empiris, perkembangan kehidupan manusia dan kemajuan teknologi transportasi berpengaruh pada perubahan social dan ekonomi regional. Persoalan transportasi di Indonesia cukup pelik, dan bukan sekadar persoalan teknis, karena kenyataan menunjukkan bahwa transportasi menyentuh aspek social, ekonomi dan keuangan. Karena itu, perlu dilakukan demistifikasi transportasi sebagai sector teknis sehingga aspek-aspek lainnya yang secara sosiologis bisa dikaji dalam sektor transportasi.

Studi ini tidak hanya menempatkan kapitalisme negara harus digunakan sebagai kategori analitis bukan hanya sebagai perangkat

72 Dampak dari kegagalan sistem transportasi antara lain pembangunan jalan yang menyingkirkan masyarakat akibat pembebasan lahan, perambahan ruang-ruang jalan oleh pedagang kaki lima, penggunaan ruang jalan untuk parkir secara ilegal, dan makin terpinggirkannya angkutan-angkutan tradisional seperti becak dan semacamnya yang berpotensi menciptakan kemiskinan kota. Kemiskinan akan menjerat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akibat dari sistem transportasi yang tidak mampu melindungi mereka.

BAB VI

Penutup: Indegenisasi Kapitalisme di Indonesia

Bagian ini sebagai penutup dari diskusi teori dan fakta. Dalam bagian ini dijelaskan praktik kapitalisme dipahami dari perspektif poststrukturalisme/poskolonialisme yang menenmpatkan asumsi-asumsi dasar kapitalisme dan klaim-klaim kebenarannya dengan didukung oleh ilmuwan-ilmuwan prokapitalisme. Kapitalisme ternyata memenangkan pertarungan dalam iklim ekonomi global ini. Kapitalisme sebagai pengetahuan yang diproduksi dan dilegitimasi melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan intelektual akademis di perguruan tinggi dan sekaligus keterlibatan ilmuwan itu juga sebagai bagian dari hegemonisasi kapital dan teknologi. Keterlibatan ilmuwan disebabkan oleh terbatasnya proses indegenisasi pengetahuan yang berasal dari Barat.

Kapitalisme dalam perspektif pascakolonial mempertanyakan keunggulan-keunggulan itu, yang tak lain adalah sebagai kelemahan dalam sistem produksi kapitalisme. Kelemahan itu terkait dengan pandangan epistemologinya yang bersifat positivistik dan mekanistik. Dengan menggunakan metodologi Foucault dapat menyingkap mistifikasi hubungan pengetahuan dan kekuasaan yang dikemukakan modernisme, kapitalisme dan globalisme. Berbeda dengan pandangan modernisme yang menyatakan adanya perbedaan antara pengetahuan murni dan pengetahuan ideologis, Foucault menyatakan pengetahuan dan kekuasaan adalah sebagai dua sisi dari mata uang yang sama.

Di satu sisi, tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan, dan begitu pula sebaliknya tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Dalam pandangan Foucault kekuasaan berbeda dari yang dipahami oleh kaum Weberian atau Marxian. Karena kaum Weberian memahami kekuasaan sebagai kemampuan subjektif untuk mempengaruhi orang lain. Sementara itu, kaum Marxian memahami kekuasaan sebagai benda material yang bisa dimiliki, dikuasai, dan juga digunakan untuk mengeksploitasi kelas yang lain. Di era yang dihidupi oleh perkembangan ilmu dan teknologi seperti saat ini, kekuasaan bukan lagi institusi, struktur atau kekuatan yang menundukkan.

Bagi kaum positivisme, obyektivitas itu ada dan berada di atas segalanya, ia bersifat obyektif, dan untuk kepentingan meyakinkan terhadap kebenaran klaimnya, Foucault coba mencari yang lain dengan meneliti serangkaian aturan atau prosedur untuk memperoleh dan menyebarkan kebenaran. Foucault membongkar sisi modernitas dari sisi metodologis, dan ia pada akhirnya membangun konsep arkeologi, genealogi, episteme dan kuasa. Tujuannya adalah menunjukkan kegagalan modernitas yang mengklaim obyektivitas dalam pandangan keilmuannya. Foucault menunjukkan bagaimana terjadinya saling keterkaitan antara kuasa dan pengetahuan secara genealogis dan terstruktur. Dalam kasus kekuasaan kapitalis internasional sekarang ini fenomena membunyikan ada relasi yang rumit yang menyebar dan hadir di mana-mana, yang diibaratkan Foucault, *kekuasaan sebagai sebuah jaringan yang tersebar dimana-mana*.

Dengan genealoginya, Foucault menemukan relasi-relasi kekuasaan obyektif di dalam realitas sosial. Akan tetapi, ia masih saja menganalisis relasi-relasi tersebut dengan metode-metode yang notabene ingin dikritiknya. Pemikiran tentang kaitan erat antara ilmu pengetahuan teknologi dengan dominasi juga terus dipertahankan dalam bukunya yang berjudul *Discipline and Punishment*. Ia memperlihatkan bagaimana kelahiran penjara modern berkait erat dengan aspek dominasi negara modern untuk memonopoli

laku kekerasan terhadap warganya. Untuk melegitimasi praktek kekerasan itu, dibentuklah sistem administrasi sentral. Sistem ini pada akhirnya akan melahirkan bidang-bidang ilmu lainnya, seperti statistik, demografi, dan seterusnya. Dengan analisisnya itu, Foucault menunjukkan bahwa ilmu-ilmu sosial tak kurang dari perwujudan sebuah kekuatan metafisik yang disebutnya sebagai *the will to truth*.

6.1 Kesimpulan

Dengan menggunakan pendekatan Foucaultian dalam meneropong teks-teks yang berupa dokumen-dokumen kebijakan yang menjadi acuan negara-negara Dunia Ketiga dan juga Indonesia dalam membuat kebijakan publik, khususnya pendekatan genealogi. Pendekatan ini digunakan karena bisa membongkar struktur kemungkinan untuk memperoleh pemahaman, terutama untuk tujuan membongkar berbagai kesalahan epistemologis, khususnya bagaimana relasi kekuasaan tertentu mengendalikan produksi pengetahuan kapitalisme dan klaim atas kebenarannya yang justru selalu ingin disembunyikan oleh para ilmuwan Timur.⁸⁶

Untuk melihat bagaimana Indonesia dalam memproduksi pengetahuan kapitalisme yang diikusti dengan berbagai penyesuaian struktural kultural secara internal, tidak lagi memberikan gambaran yang berupa justifikasi-justifikasi atau membenaran-pembenaran ataupun penilaian yang memojokkan hingga akhirnya menimbulkan gambaran Indonesia negatif. Indonesia, bukan gambaran suram, negatif atau juga positif, ada kebenaran, ada kesalahan sebagaimana penamaan yang diberikan oleh para Indonesianis yang menempatkan Indonesia sebagai obyek kajian dengan menggunakan pendekatan positivistik. Indonesia yang dibangun dalam kerangka metodologi positivistik yang memisahkan fakta dan nilai untuk menciptakan keobyektifan, ternyata tidak dapat menjelaskan struktur kapitalisme di Indonesia yang dalam

86 Lihat kembali paparan Philpott, maupun Foucault.

perkembangannya seperti sekarang ini dan juga untuk ke depannya. Pola pikir positivistik bersifat satu dimensi, yaitu dialektika positif yang mereduksi kemampuan refleksi kritis manusia untuk mencari makna-makna tersembunyi di balik fenomena-fenomena. Hal itu ditunjukkan dengan tesis-tesis yang dihasilkan oleh para pemikir Mazhab Frankfurt yang berusaha menggugat kemapanan kapitalisme dan modernisme.⁸⁷

Replika kapitalisme diadopsi Dunia Ketiga yang berada dalam suatu era yaitu pasca-kolonialisme mengalami krisis. Dikursus kejatuhan kapitalisme di Dunia Ketiga, mulai dasawarsa 80-an, baik di Amerika Latin maupun di Asia, mulai merebak. Kesahihan dan sifat universal kapitalisme mulai dipertanyakan. Sebagaimana kecanggihan kapitalisme Dunia Pertama, format kuasa dalam kapitalisme direstrukturisasi dan kapitalisme pun berubah wajah menjadi seakan-akan humanistik. Kapitalisme dipandang lebih manusiawi, bisa membebaskan manusia dari cengkeraman kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan dalam pembangunan fisik, nonfisik maupun teknologi. Apapun format relasi kuasa kapitalisme, Dunia Ketiga dan Indonesia menempati posisi sebagai negara peripheri, sehingga kapitalisme yang berkembang pun beridentitas sebagai kapitalisme peripheri. Produksi dan konstruksi kebijakan kapitalisme dalam bidang transportasi publik/BRT terkait dengan hirarki kepentingan yang berada dalam jaringan relasi kuasa lokal, nasional, regional dan internasional. Kebijakan BRT adalah subsistem kapitalisme yang masih bercorak konstruksi hegemoni pengetahuan Dunia Pertama. Dalam BRT terlihat fenomena p intensifikasi relasi-relasi sosial dalam dunia yang semakin terbuka yang menghubungkan lokalitas-lokalitas dalam satu sistem komunikasi global. Sebuah aras dunia baru yang menjebol tapal-tapal batas tradisional.

87 Dalam pandangan Adam Smith, kapitalisme liberal menekankan *the wealth of nation* sebagai tujuan akhir persaingan bebas, maka ahli-ahli dan para pembelajar kapitalisme neoliberal menekankan *the wealth of individual capitalist* sebagai tujuan tertingginya.

Konsep "*lesson drawing or lesson learning* dalam BRT" yang selalu dikemukakan oleh kapitalis-kapitalis Dunia Pertama, dan kapitalis semiperiferi untuk diadopsi di Indonesia dalam perkembangannya merupakan perwujudan dari kepentingan kapitalisme pada masa kini, dan konsep tersebut sudah menjadi ideologi. Karena konsep *lesson learning* disebarkan menurut pembagian kerja kapitalisme yaitu geografis kapitalisme Dunia Ketiga tidak dapat dianggap sebagai indigenisasi pengetahuan, karena konsep tersebut masih berkiblat pada logika kapitalisme internasional. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai hegemoni atas kuasa negara, universitas, korporasi, *civil society*.

Karena itu, wacana-wacana, pengetahuan-pengetahuan beserta institusi penopangnya pada dirinya sendiri tidaklah memuat kategori benar atau salah. Karena setiap masyarakat dan setiap zaman memiliki bentuk-bentuk wacananya sendiri yang di dalamnya kebenaran-kebenaran itu dibangun. Kebenaran adalah capaian sistem-sistem pengetahuan yang menguasai tatanan sosial yang berisi teknik-teknik, prosedur-prosedur nilai, tipe-tipe wacana, dan teknologi yang dikembangkan.

Dengan menggunakan kerangka Foucault, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kekuasaan dan kebenaran tentang perlunya meniru BRT Bogota berhubungan satu sama lain? Menurut Foucault, kedua ada di dalam praktik-praktik diskursif, tempat di mana ucapan, tindakan, aturan-aturan yang diterapkan, alasan-alasan yang diberikan bertemu dan saling berhubungan, serta benar dan salah ditentukan di dalamnya. Melalui penelitian arkeologinya, dapat diselidiki melalui dokumen-dokumen, tempat beroperasinya BRT, konsumen BRT atau dan publik BRT, tempat di mana genealogi bentuk-bentuk sejarah (teknologi moral, atau rezim rasionalitas) itu hadir. Sebagaimana pembongkoran kebenaran yang sudah dilakukan Foucault, dimana dalam praktek pengobatan klinis, hukuman penjara sebagai praktek menghukum umumnya dan bagaimana orang gila dianggap sakit mental. Melalui bukti-bukti sejarah ini, Foucault menunjuk langsung pada praktik-praktik

DAFTAR ISI

- Albrow, Martin and Elizabeth King (eds.). (1990). *Globalization, Knowledge and Society*. London: Sage Pub.
- Alvinsyah, Sutanto Soehodho dan Prisno J. Nainggolan. (2005). Public Transport User Attitude Based on Choice Model Parameter Characteristic (Case Study: Jakarta Busway System), *Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, Vo.6.
- Amin, Samir. (1976), *Unequal Development*. New York: Monthly Review Press.
- Beeson, Mark and Richard Robison (2000), Interpreting the East Asian Economic Crisis, artikel lengkap terdapat dalam *Politics and Markets in the Wake of the Asian Crisis*, London: Routledge, (dengan Robison, R., Jayasuriya, K. and Kim, H.R.).
- Bolade, Tunji A. 'Managing and Financing Urban Mass Transportation Systems in Nigeria', dalam *Urban Transport in Developing Countries: Lesson in Innovation*, Margaret Heraty (ed.), A Compilation of major papers selected from PTRC's Summer Annual Meetings 1985-1990, Perspective 1.
- Bowles, Samuel, Richard Edwards and Frank Roosevelt, *Understanding Capitalism: Competition, Command*, edisi ketiga, Oxford Univ.Press, Madison Avenue, NY, 2005.
- Berger, Peter (1990), *Revolusi Kapitalis* (terj.) Jakarta: LP3ES.
- Connel, R.W. (2000). Sociology and World Market Society, *Contemporary Sociology*, Vol. 29, No.2 (March).
- Cole, Stephen (1992). *Making Science: Between Nature and Society*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Dant, Tim. (1991). *Knowledge, Ideology and Discourse, A Sociological Perspective*. NY: Routledge.

- Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln (2000), *Handbook of Qualitative Method*, London: Thousand Oaks.
- Dupuy, Alex and Barry Truchil, *Problem in the Theory of State Capitalism*, paper, tanpa tahun.
- Frank, Gunder. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, New York: Montly Review Press.
- Foucault, Michel. (1977). *Nietzsche, Genealogy, History. In Language, Counter Memory, Practice. Selected Essays and Interviews*, D.F. Burchard (ed.), Ithaca: Cornell Univ. Press.
- Fukuyama, Francis. (1993). *The End of Hostory and The Last Man*, UK: Penguin.
- Giddens, Anthony. (1971). *Capitalism and Social Modern Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*. Cambridge: London.
- Gordon, Collin (ed.). (1980). *Michel Foucault. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books.
- Habermas, Jurgen. (1990), *Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*, (terj), Jakarta: LP3ES,
- Fauzi, Ibrahim Ali. (2003), *Jurgen Habermas; Seri Tokoh Filsafat*, Jakarta:Teraju.
- Haque, M.Shamsul. (1999). *Restructuring Development Teories and Policies: A Critical Study*, N.Y. : State University of New York Press.
- Heilbroner, Robert. (1991). *Economics as Universal Science, Social Research: An International Quarterly*. Volume 58, No. 2 (Summer 1991): 457-474.
- Hernando de Soto. (2000). *The Mystery of Capital*. Peru, The Institute for Liberty and Democracy (ILD).
- Hoogvenlt, Ankie. (1997), *Globalisastion and the Postcolonial World, the New Political Economy of Development*, London: MacMillan Press.

- Jan K. Coetzee, Johann Graaff, Fred Hendricks, Geoffrey Wood (eds.) (2001). *Development: Theory, Policy, and Practice*, London: Oxford Univ. Press.
- Kenworthy, Jeff and Felix Laube. (2002). "Urban Transport Patterns in a Global Sample of Cities and Their Linkages to Transport Infrastructure, Land Use, Economic and Environment," Institute for Sustainability and Technology Policy, Murdoch University, Australia.
- Kunio, Yoshihara. (1990). *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, (terj.) Jakarta: LP3ES.
- Marcuse, H. (1991). *One Dimensional Man*. Boston: Beacon Press.
- Milliband, R. (1969). *The State in Capitalist Society*, NY: Basic Books.
- Matsumoto, Naoko. (2006), Analysis of Policy Processes to Introduce Bus Rapid Transit Systems in Asian Cities from the Perspective of lesson drawing: Cases of Jakarta, Seoul and Beijing, *makalah dipresentasikan di Yogyakarta*, 15 Desember 2006.
- Mercado, Ruben and Antonio Paez. (2005). Canada: McMaster University, Context and Prospects for Integrated Urban Models for Metropolitan Policy Analysis and Planning in Developing Countries, *Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies*, Vo.66, h.3744-3759.
- Nonaka, Ikujiro and Takeuchi, Hirotaka (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford: Oxford University Press.
- O'Donnell, G. and Philippe C. Schmitter. (1986). 'Tentative Conclusions about Uncertain Democracies' in Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead (eds) *Transitions from Authoritarian Rule: Prospect for Democracy*, Baltimore and London: John Hopkins University Press.
- Offe, Claus. (1974). "Structural Problems of the Capitalist State: Class Rule and the political Systems" on the Selectiveness of Political Institution in Von Beyme (ed.). *German Political Studies*, Vol.1, h. 31-54.

- Ohmae, Kenichi. (1995). *The End of the Nation State: The Rise of the Regional Economies*. New York: Simon and Schuster Inc
- Petras, James and Henry Veltmeyer. (2001). *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21th Century*, London, Zed Books Ltd.
- Petras, James. (2003). *The Responsibility of the Intellectuals: Cuba, the U.S. and Human Rights*, paper, 1 Mei.
- Philpott, Simon. (2000). *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarian and Identity*, Australia: MacMillan Press.
- Poulantzas, Nicos. (1969). *The Problem of the Capitalist State*, *New Left Review* 1/58, November-December.
- Riain, Seán Ó. (2000). *States and Markets in An Era of Globalization*, *Annual Reviews Sociology*, 26:187-213.
- Robison, Richard. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital*, Australia: Allen & Unwin.
- _____. (2004). *Neo-Liberalism and the Future World: Market and the End of Politics*, *Inaugural Address* as Professor of Political Economy delivered on 5 February 2004 at the Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands, ISS Public Lecture Series, No. 1.
- Robison, Richard and Vedi R. Hadiz. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, London: Routledge.
- Sahal, Akhmad. artikel ini diambil dari situs web Kompas: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/04/Bentara/2480023.htm>.
- Seán Ó. Riain, (2000). *States and Markets in An Era of Globalization*, *Annual Reviews Sociology*, 2000, 26:187-213.
- Schipper, Lee. (2002). *Sustainable Urban Transport in the 21st Century: Challenges for the Developing World*, h. 14-16, dalam Geetam Tawari (ed.), *Urban transport for Growing Cities: High Capacity Bus Systems*, India: McMillans.
- Shin, Yoon Hwan. (1989). *Demyistifying the Capitalist State: Political Patronage, Bureaucratic Interest, and Capitalist in Formation in Soeharto's Indonesia*, a *dissertation* to the Faculty

of the Graduate School of Yale University.

- Soros, George. (2000). *Open Society: Reforming Global Capitalism*. NY: Public Affairs
- Stiglitz, Joseph E. (2002). *Globalization and Its Discontent*, NY: W.W. Norton & Company Inc.
- Sven-Ake Lindgren, (2000). *Classical and Modern Social Theory*. dalam Anderson, Heine and Lars Bo Kaspersen (eds.). Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Wallerstein, I. (1979). *The Capitalist World-Economy*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, dan lihat juga Wallestein. (1981), *Dependency in an Interdependent World: The limited possibilities of Transformation within the Capitalist World Economy*, dalam C. Munoz (ed.), *From Dependency to Development: Strategies to Overcome Underdevelopment and Inequality*, Boulder, CO: Westview.
- Wallerstein, Immanuel. (1984), *The Politics of the World Economy*, Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Wallerstein, Immanuel. (2004). *The Uncertainties of Knowledge*, Philadelphia: Temple Univ. Press.
- Webster, Andrew. (1988), *Introduction to the Sociology Development*. London: MacMillan Education.
- Weber, Max. (1978), *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, dalam Guenter Roth dan Claus Wittich (ed.), Berkeley, California: Univ.of California Press.
- Wright, A. Armstrong. (1991). *Urban Transport: World Bank Policy*, h. 19-24, dalam Margaret Heraty (ed.), *Urban Transport in Developing Countries: Lesson in Inovation, Perspective I*, PTRC Education and Research Services Ltd, London.
- Urbinati, Nadia. (1998). From the Periphery of Modernity: Antonio Gramsci's Theory of Subordination and Hegemony, *Political Theory*, Vol.26, No.3, June 1998, h. 370-391, Sage Pub, Inc.

